



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN HOSNI MUBARAK DI MESIR  
(1981-2011)**

**SKRIPSI**

**RIZFA AMALIA  
0806355336**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ARAB  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN HOSNI MUBARAK DI MESIR**

**(1981-2011)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora**

**RIZFA AMALIA**

**0806355336**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ARAB**

**DEPOK**

**JULI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 2 Juli 2012



Rizfa Amalia

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizfa Amalia  
NPM : 0806355336  
Program Studi : Arab

Depok, 2 Juli 2012



Rizfa Amalia

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Rizfa Amalia  
NPM : 0806355336  
Program Studi : Arab  
Judul : Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak Di Mesir (1981-2011)

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yon Machmudi, Ph. D (.....)

Penguji : Suranta, M.Hum (.....)

Penguji : Dr. Apipudin, M. Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, S.S, M.A

NIP. 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Alhamdulillah rabbil 'aalamiin.* Rasa syukur senantiasa penulis berikan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, kasih sayang, dan segala anugerah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir nanti.

Dimulai dari kemantapan hati untuk melakukan penelitian yang tidak mudah ini hingga akhir dari penelitian ini, penulis melewati banyak sekali tantangan yang harus dilewati. Banyak sudah yang telah dikorbankan, mulai dari waktu, keringat, dana, sampai pikiran telah diberikan dan dilakukan semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sebuah hasil penelitian yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Masih ingat di dalam benak penulis ketika harus berburu data ke berbagai perpustakaan dengan tenaga dan dana yang tidak sedikit, air mata yang mengalir, serta melawan rasa malas yang luar biasa merupakan perjuangan yang tidak bisa dilupakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam menyelesaikan penelitian ini juga didukung oleh berbagai pihak, oleh sebab itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dari awal hingga akhir penelitian ini dilakukan.

1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia;
2. Dr. Bambang Wibawarta selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
3. Dr. Afdol Tharik Wastono, M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Arab FIB UI yang telah mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Terima kasih saya ucapkan pula untuk Bapak Yon Machmudi, Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah sabar menghadapi penulis dan telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Bapak Letmiros, M. Hum. selaku pembimbing akademis penulis yang telah membimbing penulis selama empat tahun menuntut ilmu di Program Studi Arab FIB UI.

5. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada dosen-dosen Prodi Arab FIB UI, Suranta, M. Hum., Dr. Basuni Imamuddin, Dr. Fauzan Muslim, Juhdi Syarif, M. Hum., Ade Solihat, S.S., M.A., Aselih Asmawi, S.S., Dr. Apipudin, M. Hum, Dr. Maman lesmana, Minal Aidin Abdul Rahiem, S.S., Siti Rahmah Soekarba, M. Hum., Wiwin Triwinarti, M.A., Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, dan Abdul Muta'ali, M.A., M.I.P., Ph.D. Terima kasih karena telah berkenan untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga penulis tidak lagi menjadi manusia bodoh, namun menjadi manusia berilmu. Semoga segala kebaikan yang telah dosen-dosen berikan kepada penulis, dibalas oleh Allah dengan pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat.
6. Ucapan terima kasih selanjutnya adalah ucapan terima kasih yang berasal dari lubuk hati paling dalam yang penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Riza Fahmi dan ibunda Ratna Asmara Widowati. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, kesabaran, dana, serta doa yang telah diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu selama empat tahun di Prodi Arab dan menyelesaikan penelitian ini. Apa yang telah papa dan mama berikan kepada penulis tidak akan pernah nisa penulis balas dengan apapun. Sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untuk mama dan papa yang selalu ada di hati penulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk kedua adik yang terus mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini meskipun terpisahkan oleh jarak, yaitu Mutiara Annisa dan Idham Izzudien Ghifari. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang berlipat dan Allah mengumpulkan kita di *jannah*-Nya nanti.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada OOG, Nurul Budiarti, Melia Rahmawati, Jenifer, Syariati Umami, Irfyana Rasyid, Eka Murti, Alifianti Garini, Tuter Furqan, M. Firdaus Syafei, Ummu Hanie, Andi Khairunnisa, Evandari Oktarini, Fitri Afriyanti, dan Silmi Lathifah Zahra, yang telah

mendukung dan bersama-sama saling menguatkan agar mampu menyelesaikan penelitian dengan baik. Selain itu, terima kasih juga penulis ucapkan untuk rekan-rekan Prodi Arab FIB UI 2008, Risa Rizania, Meilia Irawan, Titin Fatimah, Amelia, Nuni Ratqan Amani, Defenu P. Daud, dan teman-teman SARAPAN lainnya yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan penelitian ini. Teman-teman lainnya, Anggoro Prasaja, Aulia Nur Veiny, Taruna Sakti, Dwi Febi Wahyuningtyas, Arif Setiyono yang telah selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini meskipun jarak memisahkan kita. Terima kasih untuk Mahdi yang membantu penulis mencari data di UIN Syarif Hidayatullah, Savira R. yang telah membantu penulis untuk menuju alamat data yang dicari, Inaz, Liza, Teh Dedeh, dan Mas Agus yang terus mendukung penulis di kosan tercinta.

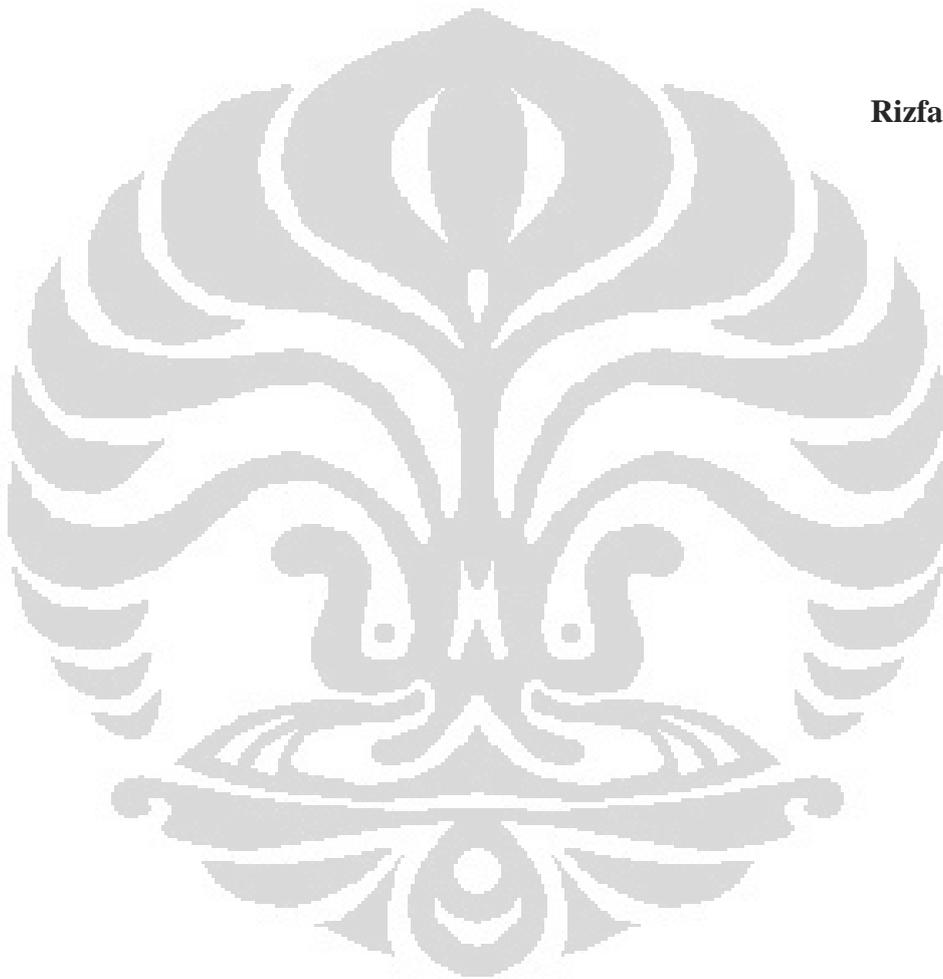
8. Terima kasih juga untuk keluarga Mahasiswa Probolinggo Universitas Indonesia (MANGGO UI), Fakhрил Maula, Dewi H., Meganingrum Arista Jiwanggi, Dewi Yuliandini H., A. Prayogi, Vit Zuraida, Gita Pamela, dan seluruh keluarga besar MANGGO UI yang telah mendukung dan terus memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua segera menyusul dan menjadi pamuda yang berguna bagi agama, Probolinggo, nusa, dan bangsa. Terima kasih kepada keluarga besar FORMASI FIB UI, BWB BEM UI 2008, SAHABAT ASRAMA ZYX, BEM FIB UI 2009, keluarga DPM FIB UI 2010 yang telah memberikan banyak pengalaman yang akan dijadikan bekal untuk melangkah ke masa depan. Semoga kita semua bisa mencapai mimpi yang diinginkan.
9. Terima kasih kepada perpustakaan UI, perpustakaan UIN, perpustakaan LIPI, perpustakaan nasional di Salemba dan Merdeka, perpustakaan CSIS, perpustakaan IQRA', perpustakaan LIPIA, perpustakaan UGM, perpustakaan Pascasarjana UI, dan perpustakaan UNJ yang telah membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam

penelitian ini. Hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagisemua, baik penulis, Prodi Arab FIB UI, maupun para pembaca sekalian.

Depok, 2 Juli 2012

**Rizfa Amalia**



**HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

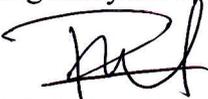
Nama : Rizfa Amalia  
NPM : 0806355336  
Program Studi : Arab  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive *Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak Di Mesir (1981-2011)**" beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia dan mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan

  
(Rizfa Amalia)

## ABSTRAK

Nama : Rizfa Amalia  
Program Studi : Arab  
Judul : Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak Di Mesir (1981-2011)

Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Hosni Mubarak di Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi proses pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan dalam bidang politik, agama, dan ekonomi adalah faktor yang mampu membuat Hosni Mubarak mempertahankan kekuasaannya di Mesir selama 30 tahun. Kebijakan dalam bidang politik dengan cara militer yang kuat, kebijakan *Security Act*, dan tidak adanya peraturan pembatasan waktu untuk menjabat sebagai presiden. Kebijakan dalam bidang agama dengan cara menindak kelompok-kelompok Islam di Mesir. Kebijakan dalam bidang ekonomi dengan cara menyejahterakan rakyat, yaitu sistem ekonomi terbuka, reformasi ekonomi, dan bantuan yang berasal dari luar negeri. Pada 11 Februari 2011, rezim Hosni Mubarak runtuh juga diakibatkan karena tiga faktor, yaitu faktor politik, agama, dan ekonomi. dalam faktor politik dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap pihak oposisi dan pengekangan kebebasan untuk berekspresi. Dalam faktor bidang agama dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap kelompok Islami. Dalam faktor ekonomi dikarenakan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi.

Kata Kunci: Hosni Mubarak, Mesir, Kebijakan, Keruntuhan Rezim

## ABSTRACT

Name : Amalia Rizfa  
Study program: Arab  
Title : Policies of Hosni Mubarak in Egypt (1981-2011)

This research explain about the policies that made by Hosni Mubarak in Egypt. The method is used in this research is methods of historical research by the topic selection process, the source collection, verification, interpretation, and writing. The findings of this research are in the fields of politics, religion, and economics is a factor that can make Hosni Mubarak maintain power in Egypt for 30 years. The Policy in the political field by a strong military, policy Security Act, and the absence of regulatory restrictions on the time to serve as president. The Policy in the field of religion by way of cracking down on Islamic groups in Egypt. Policies in the economic welfare of the people by the way, the open economic system, economic reform, and assistance from abroad. On February 11, 2011, Hosni Mubarak's regime collapse is caused by three factors, namely political, religious, and economic. in restraint of freedom because of political factors on the opposition and curbing freedom of expression. In the field factor due to the restraints of religious freedom against Islamic groups. In the economic factors due to poverty, unemployment, and corruption.

Keywords: Hosni Mubarak, Egypt, Policy, Regime Collapse

## المخلص

الاسم : رزفا أماليا  
القسم : العربي  
الموضوع : سياسات حسني مبارك في مصر (١٩٨١٢٠١١)

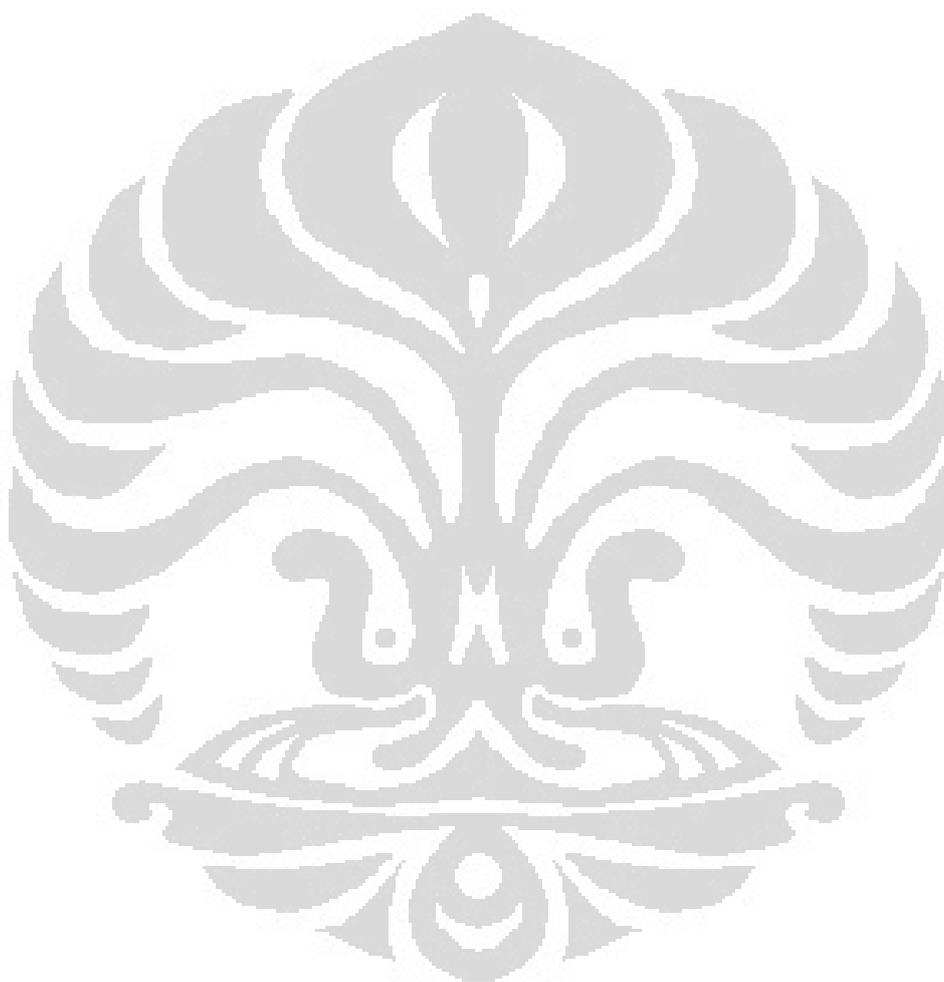
هذه الدراسة تبحث عن السياسات التي حسني مبارك في مصر. المنهج المستخدم في هي منهج التاريخية تتكون لإختار الموضوع و اجتماع الموارد والمراجعة والتولو والكتابة. ناتجة من الدراسة سياسية في مجال السياسة, الدين, ولإقتصاد عوملا التي استطاع من حسني مبارك في حفظ سلطة في مصر ٣٠ عام. السياسة في مجال سياسي يعمل جند يلق اقوياء, سياسة سوكورتى عاك وعادمت نظام أماد ليكون رئيسا جمهوريا. السياسة في مجال الدين بوقف فرقات الإسلام في مصر. السياسة في مجال الاقتصاد, يعمل بصيره امانا راعيا, وهي بنظام الإقتصاد, والمساعدة من خارج البلاد. التاريخ ١١ فبراير ٢٠١١ انهدام حكم حسني مبارك لانها ثلاث عوامل. وهي عامل السياسة والدينية ولإقتصادية. في عامل السياسة بسبب ضبط حزب المعارضة والحرية للتعبير. في مجال الدين بسببها ضبط فرقات او مجموعات الإسلام. في مجال الإقتصاد بسببها مسكنة, بطلا او بهلا واختلاسا.

الكلمة الرئيسية: حسني مبارك, مصر, انهدام الحكم.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>MULAKHAS</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Batasan Penelitian.....	5
1.5 Landasan Teori.....	5
1.6 Kajian Pustaka.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 PROFIL MESIR DAN BIOGRAFI MESIR</b> .....	11
2.1 Profil Mesir.....	11
2.1.1 Segi Geografi.....	11
2.1.2 Sistem Pemerintahan.....	14
2.1.3 Sejarah Singkat Mesir.....	15
2.2 Biografi Hosni Mubarak.....	18
<b>BAB 3 KEBIJAKAN- KEBIJAKAN HOSNI MUBARAK</b> .....	21
3.1 Kebijakan Politik.....	22
3.2 Kebijakan Agama.....	29
3.2.1 Islam.....	30
3.2.1.1 Al Jamaah Wa Jihad.....	31
3.2.1.2 Al-Azhar.....	35
3.2.1.3 Ikhwanul Muslimin.....	37
3.2.2 Kristen Koptik.....	40
3.3 Kebijakan Ekonomi.....	41
<b>BAB 4 KERUNTUHAN REZIM HOSNI MUBARAK</b> .....	48
4.1 Revolusi Mesir.....	48
4.1.1 Awal Munculnya Revolusi.....	48
4.1.2 Kronologi Demonstrasi dan Pengunduran Diri Hosni Mubarak.....	51
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pengunduran Diri Hosni Mubarak.....	57
4.2.1 Faktor Politik.....	58

4.2.2 Faktor Agama .....	61
4.2.3 Faktor Ekonomi .....	63
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi di Timur Tengah kerap kali menyita perhatian dunia, tidak terkecuali revolusi yang terjadi baru-baru ini. Rakyat Timur Tengah telah muak dengan tingkah pola pemimpin negaranya yang membuat hidup mereka tidak sejahtera. Selain itu, rakyat juga merasakan akumulasi kekecewaan yang selama puluhan tahun dikekang oleh pemimpin negaranya, seperti di Tunisia dan Mesir.<sup>1</sup> Akibatnya mereka bersatu dan meminta pemimpin negara mereka untuk meletakkan jabatannya.

Mesir memang diakui secara luas sebagai pusat budaya, memiliki politik yang berpengaruh penting di kalangan negara-negara Arab dan Timur Tengah.<sup>2</sup> Mesir juga memiliki pengaruh agama yang kuat. Pengaruh tersebut tidak hanya menyebar di Mesir saja, tetapi mulai menjalar ke negara-negara lain di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan didirikannya Universitas Al-Azhar serta lahir dan berkembangnya Ikhwanul Muslimin.

Revolusi Mesir diawali pada 1919. Rakyat Mesir menuntut Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada Mesir. Revolusi ini dipicu oleh diasingkannya Saad Zaghul oleh Inggris karena berusaha dan berjuang menuntut kemerdekaan untuk Mesir. Hal tersebut memancing kemarahan rakyat Mesir dan akhirnya pada 9 Maret 1919 terjadilah revolusi Mesir yang dilakukan rakyat di seluruh Mesir. Inggris akhirnya membebaskan Saad Zaghul dan memberikan kemerdekaan kepada Mesir.

Mesir kemudian juga mengalami revolusi untuk kedua kalinya yang terjadi pada tahun 1952. Revolusi tersebut terjadi karena keadaan Mesir yang membuat rakyat tersiksa, antara lain campur tangan asing yang merajalela, rentetan perang Palestina 1948 yang berbatasan langsung dengan Mesir, sistem kerajaan yang

---

<sup>1</sup> David Akhmad Ricardo, *Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*, Jakarta: Arus Timur, 2011, hlm. 44.

<sup>2</sup> Peran tersebut khususnya berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel. Peran penting Mesir juga dapat dilihat dari organisasi Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Persatuan Afrika, dan Gerakan Non Blok dan Mesir merupakan salah satu dari pemrakarsa berdirinya organisasi-organisasi tersebut. Sumber: Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 151.

menindas rakyat, merosotnya ekonomi, serta rusaknya kehidupan sosial. Kondisi tersebut mendorong sebagian perwira yang menamakan dirinya *Dhubbath Al-Ahrar* dibawah pimpinan Gamal Abdul Naser. Kelompok tersebut bertugas mengubah serta memperbaiki situasi Mesir agar menjadi lebih baik. Revolusi tersebut berakhir dengan terbebasnya Mesir dari pengaruh asing dan jatuhnya rezim Raja Farouk. Hal tersebut menandakan berubahnya sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik pada 18 Juni 1953 dengan Jenderal Muhammad Naguib menjadi presiden Mesir pertama.<sup>3</sup>

Muhammad Naguib hanya menjabat sebagai presiden selama satu tahun. Dia dilawan oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Akhirnya dia meninggal dunia. Selanjutnya Naguib diganti oleh Gamal Abdul Nasser pada tahun 1953.

Keadaan politik Mesir pada masa pemerintahan Nasser sangat terkendali. Nasser tidak menggunakan sistem multipartai, namun dia membentuk *Arab Socialist Union* (ASU) yang berfungsi sebagai organisasi politik untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesadaran Pan Arabisme.<sup>4</sup> Dalam bidang politik luar negeri, Nasser mulai menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet.<sup>5</sup> Persenjataan Mesir berasal dari Uni Soviet. Puncaknya adalah dengan dibangun dan diresmikannya Bendungan Aswan pada 1964. Nasser menggunakan sistem sosialisme dalam pemerintahannya yang dimaksudkan sebagai sistem kerakyatan yang kebijakan-kebijakannya ditujukan untuk meringankan beban rakyat. Nasser melakukan pembebasan biaya dalam berbagai bidang seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, mempertahankan harga yang rendah untuk kebutuhan pokok rakyat Mesir, setiap lulusan perguruan tinggi dapat bekerja di sektor birokrasi, serta kebijakan lainnya yang meringankan beban rakyat Mesir. Ternyata kebijakan tersebut semakin memperburuk ekonomi Mesir. Ketika sedang sibuk dengan aktivitasnya, Nasser mendapat serangan jantung

<sup>3</sup> David Akhmad Ricardo (2011), *op cit.*, 26.

<sup>4</sup> Pan Arabisme merupakan sebuah doktrin yang menginginkan adanya persatuan negara dan bangsa Arab. Sumber: Syadat H., M. Umar. "Pan-Arabisme *VIS-À-VIS* Zionisme-Imperialisme Modern". *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam, Jakarta* Vol. V, (2002-2003): 1.

<sup>5</sup> Sebelumnya Nasser mencoba mendekati dengan US untuk membeli persenjataan guna memperbarui persenjataan Mesir yang telah usang, namun US meminta Mesir untuk bergabung dengan Gerakan Anti Komunis. Nasser enggan melakukannya dan akhirnya memilih untuk mendekati kepada Uni Soviet. Meskipun telah mendekati kepada Uni Soviet, Mesir tidak mendapat pengaruh komunis dari Uni Soviet. Sumber: Riza Sihbudi dkk (1995), *Op cit.*, hlm. 152-153.

dalam peristiwa September Hitam di Jordania pada 28 September 1970. Pada saat itu Nasser sedang mengusahakan penyelesaian sengketa antara PLO<sup>6</sup> dengan Raja Hussein. Tampuk kekuasaan kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden Mesir, Anwar Sadat.

Anwar Sadat diangkat menjadi seorang presiden melalui referendum.<sup>7</sup> Setelah Sadat diangkat sebagai Presiden Mesir, dia melakukan kebijakan *infitah* (pintu terbuka) yang merupakan awal mula dari liberalisasi ekonomi Mesir. Sadat beralasan bahwa Mesir membutuhkan investasi dari asing untuk memperbaiki perekonomian Mesir, namun hingga akhir kekuasaannya, ekonomi Mesir tidak kunjung membaik. Pada masa pemerintahan Sadat terjadi Perang Yom Kippur yang berakhir dengan kemenangan dari pihak Israel. Tahun 1978 Sadat membuat keputusan yang mencengangkan. Dia menandatangani Perjanjian Camp David dengan Israel yang juga diprakarsai oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Mesir dikeluarkan dari Liga Arab dan Uni Soviet pun mulai merenggangkan hubungan negaraya dengan Mesir. Anwar Sadat ditembak oleh orang tidak dikenal pada 1981 ketika sedang melakukan parade militer perayaan kemenangan Mesir saat melawan Israel pada 1967. Hosni Mubarak kemudian ditunjuk untuk menggantikan posisi Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir.<sup>8</sup>

Pada 14 Oktober 1981, Mubarak menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden Mesir. Ketika Anwar Sadat dibunuh dan tewas, *Majelis Al-Sya'ab dan Majelis Al-Syuura* Mesir langsung mengangkat Mubarak untuk menjadi Presiden Mesir. Enam tahun pertama, Mubarak menjalankan politik Mesir sesuai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Sadat. Dia juga mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi Mesir yang belum membaik. Mubarak terus menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Dia juga memperbaiki hubungan Mesir dengan Uni Soviet dengan cara meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara.<sup>9</sup> Setelah itu dia memimpin dengan berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidaksejahteraan rakyatnya. Keadaan

<sup>6</sup>PLO adalah singkatan dari *Palestine Liberation Organization*. Organisasi ini dibentuk untuk menyatukan faksi-faksi di Palestina yang berjuang melawan Israel. PLO telah menjadi simbol identitas dan eksistensi rakyat Palestina. Sumber: Masyrofah, "Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina". *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam*, Vol. 14 (2008): 53.

<sup>7</sup>Zulharbi Salim. *Anwar Sadat dan Jerusalem*. Jogjakarta: Gre Publishing, 2011, hlm. 171.

<sup>8</sup>Riza Sihbudi dkk (1995), *Op cit.* hlm. 159-160.

<sup>9</sup>*Ibid.* 161-162.

ekonomi Mesir juga belum membaik seperti yang diharapkan. Akhirnya pada 11 Februari 2011, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang presiden akibat diminta turun oleh rakyatnya dengan cara demonstrasi besar-besaran.

Pada umumnya negara-negara Arab masih memberlakukan sistem dinasti yang merupakan warisan dari Dinasti Umayyah sejak abad ke-7. Meskipun Mesir secara *de jure* merupakan sebuah negara dengan sistem republik, secara *de facto* tetap saja melestarikan sistem dinasti. Aplikasinya adalah penguasa memonopoli kemerdekaan dengan kekuasaan yang semena-mena sedangkan rakyat harus menaatinya.<sup>10</sup> Tidak heran jika pada 2011, negara-negara Timur Tengah mengalami berbagai demonstrasi yang menuntut agar presiden mereka turun dari jabatannya.

Demonstrasi yang dilakukan rakyat Mesir secara besar-besaran di seluruh penjuru Mesir untuk menuntut presidennya turun tentulah karena banyak kebijakan dan hal-hal lain yang dilakukan Hosni Mubarak selama berkuasa yang membuat rakyat hidup tidak sejahtera. Hal menarik lainnya adalah Hosni Mubarak merupakan presiden Mesir yang paling lama berkuasa. Tidak tanggung-tanggung 30 tahun dia menjadi orang nomor satu di Mesir, yaitu sejak 1981 hingga 2011. Dari situ muncullah pertanyaan mengapa dia bertahan hingga selama itu sebagai presiden? Kemudian apa saja usaha-usaha yang dia lakukan sehingga dia bisa bertahan menjadi Presiden Mesir paling lama hingga saat ini? Apa penyebab Hosni Mubarak diminta oleh rakyatnya untuk segera mengakhiri kekuasaannya di Mesir? Hal-hal tersebut merupakan fokus yang dilakukan dalam penelitian ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Hosni Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya selama 30 tahun (1981-2011) ?
2. Apa faktor penyebab kejatuhan rezim Hosni Mubarak pada 2011?

---

<sup>10</sup> Ahmad Syafii Maarif. "Revolusi Tahrir dan Demokrasi." *Republika* 22 Feb. 2011, hlm. 2.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Hosni Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya
2. Menjelaskan faktor penyebab kejatuhan rezim Hosni Mubarak pada 2011

### 1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan biografi Hosni Mubarak dalam aspek keluarga, pendidikan, dan karir militer dan politik. Profil Mesir yang dijelaskan hanya dari segi geografis, sistem pemerintahan, dan sejarah singkat. Kemudian penulis hanya menjelaskan kebijakan-kebijakan penting serta respon masyarakat terhadap kebijakan penting yang dilakukan oleh Hosni Mubarak selama menjabat sebagai Presiden Mesir sejak 1981 hingga 2011. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibahas hanya dalam bidang politik, agama, dan ekonomi.

Dalam pembahasan akhir kekuasaan Hosni Mubarak di Mesir, akan dijelaskan proses keruntuhan, mulai dari faktor pemicu, kronologis demonstrasi, sampai kronologis turunnya Hosni Mubarak dari jabatannya sebagai presiden. Setelah itu, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab keruntuhan rezim Hosni Mubarak.

### 1.5. Landasan Teori

Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya, sementara pemerintah hanya sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat, demikian yang dikatakan oleh Larson. Calvert juga mengatakan bahwa negara adalah komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik; pemerintah adalah individu atau sebuah tim dari individu-individu yang mengambil keputusan yang member dampak bagi warga sebuah masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Arif Budiman. *Teori Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 84.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai demokrasi dan otoriter. Pada dasarnya sistem atau rezim<sup>12</sup> politik yang digunakan oleh sebuah negara dikembalikan pada dua kelompok dasar, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis.<sup>13</sup> Dalam teori ini dapat diketahui bagaimana cara seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya.

Sistem yang demokratis ditandai dengan kedaulatan rakyat. Sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem demokrasi jika minimal kekuatan rakyat sama dengan kekuatan pemerintah. Jika kekuatan pemerintah lebih besar dari kekuatan rakyatnya, maka negara tersebut menganut sistem otoriter. Jika terdapat sebuah negara yang kekuatan pemerintahnya lebih kuat daripada kekuatan rakyatnya, maka demokrasi tersebut hanya sekedar nama.

Sedangkan sistem politik otoriter biasanya sang penguasa negara memiliki kekuasaan mutlak atau hampir mutlak. Sampai saat ini masih ada negara yang memiliki sistem politik ini. Dia didukung oleh kekuatan militer yang sangat kuat dan atau ideologi yang kuat pula. Pada zaman dahulu ideology tersebut berupa penjelasan yang bersifat mistis atau mitos, seperti raja adalah titisan dewa, wakil Gereja, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ideologi tersebut berupa penjelasan-penjekasan yang rasional, seperti demi kepentingan ekonomi negara, demi stabilitas politik negara dan masyarakat, serta hal-hal lainnya. Rakyat mau menerima karena mereka yakin dan percaya bahwa kesejahteraan dan kedamaian akan diraih dari kepemimpinan pemerintahnya. Sehingga segala peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan pers maupun pembatasan terhadap kehidupan politik, misalnya, dapat diterima oleh rakyat. Jadi, jika suatu negara dengan sistem politik otoriter masyarakatnya telah menerima ideologi dari pemerintah, maka tidak lagi diperlukan militer yang kuat.<sup>14</sup> Jika masyarakat tidak menerima ideologi pemerintah, maka peran militer

---

<sup>12</sup> Rezim menurut Stephen D. Krasner lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, serta prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh pengelola negara, namun dalam pengertiannya secara luas, rezim berkaitan dengan orang atau sekelompok orang yang menjadi penguasa negara. Rezim juga dapat diartikan dengan sistem politik yang dianut sebuah negara, entah itu demokratis atau otoriter. Rezim demokratis ditandai dengan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan secara demokratis, sementara rezim otoriter adalah kebalikannya. Sumber: *Ibid.* hlm. 87.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

yang kuat sangat diperlukan oleh pemerintah agar pemerintahannya aman dan rakyat menuruti permintaan sang penguasa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Cara yang pertama adalah melalui kekuatan militer yang kuat. Cara yang kedua adalah dengan menanamkan ideologi yang kuat kepada rakyatnya sehingga mereka dapat mematuhi segala kebijakan yang dilakukan pemimpinnya. Jika penguasa telah memiliki militer yang kuat, dia tidak harus menanamkan ideologi kepada rakyatnya. Jika dilaksanakan dua-duanya, maka penguasa dapat mempertahankan kekuatannya dengan sangat kuat.

### **1.6. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian mengenai berbagai kebijakan penting serta jatuhnya rezim Hosni Mubarak, penulis telah melakukan kajian terdahulu, mulai dari buku, surat kabar, skripsi, tesis, maupun disertasi.

Tinjauan pertama adalah tesis yang ditulis oleh Mochammad Machrus. Tesis ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Mesir Terhadap Agama Minoritas Studi Kasus atas Diskriminasi Kristen Koptik Pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak (1981-2007)”. Dalam tesis ini ditulis mengenai kebijakan agama di Mesir yang dilakukan selama Hosni Mubarak menjadi presiden. Fokusnya adalah diskriminasi yang dilakukan Mubarak terhadap pemeluk agama Kristen Koptik. Akan tetapi dijelaskan pula mengenai kebijakan agama, baik berdasarkan konstitusi maupun fakta di lapangan, namun tesis tersebut tidak menjelaskan bagaimana kebijakan agama yang diterapkan Hosni Mubarak terhadap agama Islam yang merupakan mayoritas agama yang dianut penduduk Mesir.

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Piramida Peradaban Budaya Dari Mesir Kuno” yang ditulis oleh Retno Kurniasih pada 2010. Dalam skripsi ini terdapat bab yang membahas mengenai dampak Piramida sebagai objek wisata. Subbab tersebut membahas tentang dampaknya terhadap perekonomian Mesir pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, yaitu sebagai pendapatan terbesar untuk keuangan Mesir. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian

ini membahas cara Hosni Mubarak menyejahterakan rakyatnya dalam bidang ekonomi dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah tesis mahasiswa pasca sarjana Program Pengkajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia yang ditulis oleh R. A. Arief. Judul tesis tersebut adalah “Politik Luar Negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David (Peran Mesir Bagi Terciptanya Stabilitas Politik di Timur Tengah)”. Tesis ini menjelaskan tentang politik dan ekonomi Mesir berkaitan dengan Perjanjian Camp David, baik sebelum maupun sesudah perjanjian tersebut. Dalam tesis tersebut terdapat subbab Politik Luar Negeri Mesir di bawah kekuasaan Mubarak. Dalam pembahasan tersebut memang dijelaskan politik dalam negeri Mesir, namun tidak dijelaskan bagaimana peran militer yang memiliki pengaruh penting di Mesir. Sedangkan dalam bidang ekonomi, dijelaskan ekonomi Mesir di bawah kekuasaan Hosni Mubarak. Hal yang berbeda dengan penelitian ini adalah tesis tersebut menjelaskan keadaan ekonomi Mesir yang berkaitan dengan bantuan luar negeri, sedangkan penelitian ini membahas kebijakan penting bidang ekonomi yang pada akhirnya justru berdampak pada kejatuhan Hosni Mubarak.

Tinjauan pustaka terakhir adalah buku dengan judul *Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011* yang ditulis oleh Galal Amin. Buku ini menceritakan tentang Mesir di bawah pemerintahan Hosni Mubarak. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas upaya Hosni Mubarak mempertahankan kekuasaannya, sedangkan buku tersebut lebih menggambarkan situasi dan kondisi Mesir di bawah kekuasaan Hosni Mubarak.

### **1.7. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sejarah, terdapat lima tahap yang harus dilakukan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.<sup>15</sup>

Hal pertama yang dilakukan adalah pemilihan topik. Memilih topik penelitian dilakukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis adalah deskripsi analisis yang

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1997, hlm. 89.

dilanjutkan dengan perencanaan penelitian. Secara kedekatan emosional, penulis tidak menggunakan hal tersebut, namun penulis menggunakan kedekatan intelektual. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Arab dan sebelumnya pernah mempelajari hal-hal mengenai sejarah Mesir. Selanjutnya adalah perencanaan penelitian. Dalam rencana penelitian, penulis mengemukakan permasalahan, historiografi yang akan menjelaskan mengenai profil Mesir dan profil Hosni Mubarak, sumber sejarah, dan garis besar yang akan dibahas.

Tahap kedua adalah pengumpulan sumber. Materi yang dapat dijadikan sumber dapat berupa dokumen tertulis maupun lisan. Untuk dokumen tertulis, penulis mencari data berupa pustaka kemudian akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis mencari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, dan surat kabar yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tidak hanya buku, penulis juga mencari situs-situs internet yang valid sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

Tahap ketiga adalah verifikasi. Setelah menentukan masalah dan mencari sumber data, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa otentisitas atau keaslian data dan kredibilitas data tersebut.<sup>16</sup> Tahap keempat adalah interpretasi. Setelah mendapat sumber data yang otentik dan kredibel, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Setelah itu melakukan sintesis, yaitu menyatukan data-data yang sudah terkumpul tersebut.

Tahap terakhir adalah penulisan. Dalam penulisan penelitian sejarah aspek kronologi sangat penting. Penyajian penelitian ini terdiri dari pengantar berupa latar belakang permasalahan atau lintasan sejarah, historiografi dan pendapat penulis mengenai tulisan orang lain, dan hal-hal lain yang dijelaskan di bab satu. Kedua adalah berupa hasil penelitian berupa isi dari permasalahan yang harus mencantumkan sumber data yang diperoleh. Terakhir adalah kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang ada.<sup>17</sup>

## 1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 99-100.

<sup>17</sup> *Ibid.* 99-104.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul Profil Mesir dan Biografi Hosni Mubarak. Dalam penjabaran profil Mesir akan dijelaskan mengenai geografi Mesir, sistem pemerintahan, dan sejarah singkat Mesir. Sedangkan untuk biografi Hosni Mubarak, akan dijelaskan mengenai keluarga, pendidikan, dan karirnya di bidang militer dan politik.

Bab III berjudul Kebijakan - Kebijakan Penting Hosni Mubarak. Subbab pertama mengenai kebijakan politik dan juga militer. Selanjutnya adalah kebijakan agama yang terdiri dari Islam, Ikhwanul Muslimin, dan Kristen Koptik. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi.

Bab IV berjudul Keruntuhan Rezim Hosni Mubarak. Subbab pertama adalah revolusi Mesir yang merupakan momen berakhirnya kekuasaan Hosni Mubarak. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab jatuhnya Hosni Mubarak

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan.

## BAB II

### PROFIL MESIR DAN BIOGRAFI HOSNI MUBARAK

#### 2.1 Profil Mesir

Berbicara mengenai kebijakan penting yang dilakukan Hosni Mubarak ketika dia menjabat presiden Mesir, tentulah terlebih dahulu harus mengetahui kondisi dan situasi wilayah kekuasaannya. Hal ini penting dilakukan karena dari mengenal daerah kekuasaan dapat diketahui apa saja faktor-faktor dari negara yang mempengaruhi kebijakannya.

##### 2.1.1 Geografi

Mesir merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Libya. Nama resmi Mesir adalah العربية الجمهورية مصر dengan luas wilayahnya 997.739 km<sup>2</sup>. Ibu kotanya terletak di Kairo. Bahasa yang digunakan adalah Arab (resmi), Inggris, dan Perancis. Agama yang terdapat di Mesir adalah Islam (resmi) sebanyak 81% dan Kristen sebanyak 17,8%, sedangkan lainnya adalah lain-lain 0,4%. Mata uang yang digunakan adalah Pound Mesir (LE).<sup>18</sup> Wilayah Mesir dibagi menjadi 26 *muhafazat* (setingkat provinsi) dan dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh presiden.

Mesir memiliki sebuah sungai yang sangat terkenal bernama Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di Afrika (6.690 km). Sejak zaman Fir'aun, bagi rakyat Mesir, Sungai Nil merupakan sumber utama baik untuk kehidupan masyarakat maupun budaya.<sup>19</sup> Di sepanjang sungai nil inilah rakyat Mesir sejak dulu menjalani kehidupan dengan tanah yang subur sehingga rakyat bisa bisa hidup dari hasil pertanian yang baik. Selain hasil pertanian, sungai Nil juga

---

<sup>18</sup> Redaksi Ensiklopedia Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*, Jakarta: PT. Intermedia, 1990, hlm. 164.

<sup>19</sup> Riza Sihbudi dkk (1995), *Op cit.*, hlm. 144.

mampu menghasilkan hasil mineral dan pertambangan, seperti batubara, minyak dan gas, fosfat, besi, gypsum, garam, batukapur, kalsium, dan kaolin.<sup>20</sup>

Mesir terletak di zona gurun besar tropis, oleh karena itu Mesir memiliki ciri-ciri iklim seperti sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan yang rendah, dan udara yang kering. Terkadang pada Maret hingga Juni terjadi peristiwa *Khamsin* yang diiringi naiknya suhu udara sekitar 8°C - 11°C. Mesir juga memiliki dua musim, yaitu musim dingin yang berlangsung dari November hingga Maret dan musim panas yang berlangsung dari Mei sampai September. Hujan terjadi pada musim dingin. Khamsin adalah badai gurun yang disertai debu yang terjadi karena udara tropis yang berasal dari selatan bergerak ke utara karena tekanan udara yang rendah melintasi Mesir menuju delta. Semakin ke arah selatan Mesir, tingkat curah hujan semakin sedikit.<sup>21</sup>

Terdapat tiga etnis utama di Mesir. Etnis-etnis tersebut yaitu Arab, Nubia yang berasal dari selatan dan berkulit hitam, dan Hamit yang merupakan orang pribumi asli Mesir terdahulu dengan warna kulit putih kehitam-hitaman. Mesir merupakan negara dengan penduduk terpadat kedua di Afrika setelah Nigeria.<sup>22</sup> Setiap kepala keluarga rata-rata memiliki lima orang anak. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Mesir memiliki dua pusat kota terbesar, yaitu Kairo dan Alexandria. Kairo merupakan ibu kota Mesir yang terletak di daerah pedalaman dan mendominasi kawasan delta maupun lembah sungai Nil atas atau hulu sungai Nil.<sup>23</sup> Kairo juga merupakan kota terbesar di Afrika. Sedangkan Alexandria merupakan pintu gerbang untuk menjalin hubungan dengan dunia, baik secara kebudayaan maupun untuk perdagangan. Kota ini terletak di kawasan pantai Laut Tengah, di sisi barat laut delta sungai Nil. Pembangunan Terusan Suez juga menghasilkan kota-kota besar, yaitu Isma'iliyah dan Port Said. Sedangkan kota-kota besar lainnya antara lain: Damietta, Rosetta, Asyut, Aswan, dan EL Mahalla el-Kubra.

Dalam bidang pendidikan, Mesir memiliki tiga tahap, yaitu sekolah dasar yang ditempuh selama enam tahun, sekolah menengah pertama selama tiga tahun,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Redaksi Ensiklopedi Indonesia (1990), *Loc cit.*, hlm. 165.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

dan sekolah menengah atas selama tiga tahun. Selanjutnya para siswa dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi. Dalam undang-undang pendidikan yang disahkan pada 1933, Mesir memberikan pendidikan beasiswa penuh kepada seluruh siswa dalam program wajib belajar pada anak-anak usia 6-12 tahun. Tidak hanya untuk sekolah dasar, sejak 1950 Mesir juga membebaskan biaya bagi siswa yang sedang duduk di bangku sekolah menengah dan perguruan tinggi. Untuk sekolah lanjutan terdapat dua program, yaitu umum dan kejuruan. Sekolah lanjutan umum merupakan sekolah yang siswanya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan kejuruan mencakup bidang ekonomi, industri, dan pertanian.

Mesir juga memiliki empat universitas yang terletak di Kairo, yaitu Universitas Al-Azhar, Universitas Kairo, Universitas Helwan, dan Universitas Ain Shams. Universitas Al-Azhar didirikan oleh Jawhar Al-Siqilli pada abad ke-10. Hingga kini universitas tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam karena Universitas Al-Azhar merupakan pusat pendidikan Islam di dunia sejak seribu tahun yang lalu. Banyak mahasiswa asing yang berasal dari berbagai penjuru dunia, hal tersebut memberikan dampak yang baik terhadap penambahan angka devisa untuk Mesir. Selain itu, terdapat sebuah universitas swasta yang sangat terkenal, yaitu Universitas Amerika Serikat yang juga terletak di Kairo.<sup>24</sup>

Mesir memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam bidang pertambangan, Mesir menghasilkan minyak (sumber daya alam paling potensial), fosfat, batubara, mangan, mineral, gas, kaolin, kalsium, garam, gypsum, dan bijih besi.<sup>25</sup> Dalam sektor pertanian, Mesir menghasilkan gandum, buncis, bawang, dan semanggi saat musim panas. Pada musim dingin, Mesir menghasilkan kapas, padi, dan jagung. Mesir merupakan salah satu produsen kapas terbesar di dunia. Adapun hasil pertanian lainnya antara lain tebu, tomat, kentang, kurma, semangka, dan jeruk. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk memberikan fasilitas terbaik seperti pembuatan kanal, bendungan, pemberian pupuk, pompa air, dan lain-lain. Dalam bidang peternakan, Mesir juga menghasilkan sapi, domba, kambing, unggas, serta perikanan air tawar.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>25</sup> Riza Sihbudi dkk (1995), *Op cit.*, hlm. 144.

### 2.1.2 Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Mesir adalah republik dan presiden sebagai kepala negara. Berdasarkan Piagam Nasional 1962 dan Konstitusi 1971, Mesir merupakan sebuah ‘negara sosialis demokratis yang disebut Republik Arab Mesir. Dalam Piagam Nasional 1962 dikatakan bahwa tujuan Republik Mesir adalah kemerdekaan, sosialisme, dan kesatuan Arab, sedangkan konstitusi menetapkan struktur resmi dalam pemerintahan Mesir, yakni presiden, kabinet, badan legislatif, dan pengadilan.<sup>26</sup>

Dalam hukum konstitusi Mesir, presiden didukung oleh minimal dua per tiga anggota legislatif kemudian harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas para pemilih. Presiden memiliki masa bakti yang tidak terbatas, sehingga Presiden bebas berkuasa sampai kapanpun. Satu masa bakti atau periode kepemimpinan Presiden adalah enam tahun. Presiden bebas mengangkat seorang Wakil Presiden ataupun Perdana Menteri serta anggota kabinetnya, selain itu Presiden juga dengan leluasa dapat memberhentikan mereka. Tugas anggota kabinet adalah membantu presiden dalam merencanakan dan mengarahkan kebijaksanaan.

Untuk badan legislatif, Mesir memiliki sebuah lembaga bernama Majelis Rakyat atau *Majlis Al-Sya'ab* yang separuh dari anggotanya haruslah seorang pekerja atau petani. Masa bakti dalam satu periode adalah lima tahun. Pemilih dapat memilih 448 anggota, sedangkan presiden mengangkat 10 anggota majelis. Rakyat yang boleh ikut serta dalam pemilihan umum adalah warganegara Mesir yang berusia 18 tahun ke atas.

Berhubung sistem pemerintahan Mesir adalah republik, tentulah terdapat partai politik di dalamnya. Partai terbesar di Mesir adalah Partai Demokrasi Rakyat yang memang mencakup berbagai kalangan masyarakat. Adapun partai politik lainnya yang berada di Mesir adalah Partai Buruh Sosialis dan partai-partai independen lainnya.<sup>27</sup> Sistem pemerintahan tersebut berjalan sampai 2011 sebelum terjadi Revolusi Mesir 2011.

---

<sup>26</sup> Redaksi Ensiklopedi Indonesia (1990), *Loc cit.*, hlm. 168.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

### 2.1.3 Sejarah Singkat Mesir

Sejarah singkat yang terjadi di Mesir penting untuk dijabarkan karena dari sejarah singkat tersebut dapat diketahui mengenai kondisi dan situasi Mesir sebelum Hosni Mubarak menjadi Presiden Mesir. Adapun sejarah singkat yang dijabarkan dimulai pada 1919. Pada 1919 terjadi revolusi pertama yang dilakukan oleh rakyat Mesir untuk menentang Inggris. Sampai pada akhirnya pada 1922 Inggris memerdekakan Mesir. Bentuk pemerintahannya saat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Fuad I.<sup>28</sup>

Pada 1952, Mesir mengalami revolusi keduanya. Kali ini rakyat meminta Raja Farouk untuk turun dari tahtanya karena keadaan Mesir saat itu cukup terpuruk. Hal ini ditandai dengan ketidakbebasan rakyat untuk menyuarakan pendapat sehingga menyebabkan merosotnya ekonomi Mesir serta rusaknya kehidupan sosial. Akhirnya, Raja Farouk pun turun dari jabatannya sebagai raja dan digantikan oleh putranya, Raja Fuad II. Berhubung raja belum cukup dewasa, maka kekuasaannya dipegang oleh Dewan Keamanan yang dibuat oleh *Dubbath Al-Ahrar*. *Dubbath Al-Ahrar* adalah Dewan Jendral yang dibawahi oleh Gamal Abdul Naser. Mereka terdiri dari perwira-perwira Mesir yang dibentuk untuk mengubah situasi Mesir menjadi aman dan tentram.

Merasa sistem kerajaan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Mesir, pada 18 Juni 1953 sistem pemerintahan Mesir berubah dari kerajaan menjadi republik dengan presiden pertama bernama Muhammad Naguib. Muhammad Naguib hanya bertahan selama satu tahun menjadi seorang Presiden Mesir. Selanjutnya tampuk kekuasaan berada di pundak Muhammad Naguib.<sup>29</sup>

Pada 1967 terjadi Perang Enam Hari antara Arab dengan Israel. Mesir memiliki peran yang cukup signifikan dalam perang ini. Pada 5 Juni 1967, Israel mendadak menyerang Mesir habis-habisan lewat udara, darat, dan laut hingga berhasil menduduki Terusan Suez.<sup>30</sup> Melihat penyerangan yang dilakukan oleh Israel, negara-negara Arab pun akhirnya berdiri di belakang Mesir untuk bersama-sama bahu membahu melawan Israel. Disaat genting tersebut, Gamal Abdul Naser selaku presiden Mesir saat itu meninggal dunia. Anwar Sadat kemudian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>29</sup> David Akhmad Ricardo (2011), *Op cit.*, hlm 26.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 27.

mengganti posisi Naser sebagai presiden Mesir. Melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan Naser, Sadat mengirim pasukannya untuk melintasi Terusan Suez dan menghancurkan kekuatan Israel pada tanggal 6 Oktober 1973. Setelah kejadian tersebut, Israel menyadari kekuatan Mesir dan akhirnya mau berdamai dan mengembalikan kawasan Sinai yang telah direbut kembali ke dalam pangkuan Mesir.<sup>31</sup>

Sistem yang dianut oleh Gamal Abdul Nasser dalam menguasai Mesir adalah sosialisme. Sosialisme yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang kerakyatan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan yang bersifat meringankan beban rakyat, seperti membebaskan biaya sekolah.<sup>32</sup> Dia menjalani pemerintahan di bawah naungan militer melalui ASU (*Arab Socialist Union*) karena hanya lewat militerlah dia mampu mencapai tujuan-tujuan sosialismenya.<sup>33</sup> Nasser juga beranggapan bahwa siapa yang tidak mengikuti penggalangan tersebut merupakan pembangkang negara yang harus dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. Nasser juga melarang berdirinya partai politik, padahal menurut oposisi, dengan adanya berbagai partai politik akan menunjukkan keberagaman yang merupakan tonggak dari proses demokratisasi.<sup>34</sup> Setelah Gamal Abdul Nassr meninggal, kedudukannya digantikan oleh Anwar Sadat selaku wakil presidennya.

Setelah Nasser meninggal, posisi Presiden Mesir diganti oleh Anwar Sadat. Salah satu hal penting yang terjadi dalam sejarah Mesir adalah saat Anwar Sadat berkunjung ke Israel dan akhirnya menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan Israel pada 17 September 1977. Hal ini membuat negara-negara Arab lainnya geram dan mengeluarkan Mesir dari Liga Arab. Tidak hanya itu, dampak selanjutnya adalah semua bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir pun dikucilkan. Begitu pula yang terjadi di luar negara-negara Arab, Uni Soviet mulai menjaga jarak dengan Mesir terlebih Sadat memulangkan semua

---

<sup>31</sup> Rza Sihbudi dkk. (1995), *Op cit.*, hlm. 157.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>33</sup> Pada masa Nasser, dia belum melakukan proses demokratisasi, namun masih dalam proses untuk menuju proses demokratisasi. Sumber: Dam Syamsumar & Agus R. Rahman, *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001, hlm. 96.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

penasehat militer Rusia. Mesir pun akhirnya mengalami isolasi politik dari dunia internasional.

Anwar Sadat mulai memberikan sedikit kebebasan dalam bidang politik. Dia mulai mengizinkan berdirinya partai politik. Dia mendirikan *National Democratic Party* (NDP) yang menjadi partai yang sangat kuat dan tidak dapat diimbangi dengan partai oposisi. Partai ini disahkan pada Juli 1978. Sadat mendirikan partai ini sebagai alat untuk mendukung politik di Mesir. Partai ini dipimpin langsung oleh Anwar Sadat. Sebelumnya, sejak 1953, Nasser melarang untuk mendirikan partai, namun Sadat mengubah aturan itu pada 1976. Sadat juga mengizinkan adanya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Nasional sehingga didirikanlah partai politik.<sup>35</sup> Kemudian Sadat juga membubarkan ASU agar tidak ada lagi sisa-sisa pengaruh dari Nasser.<sup>36</sup>

Meskipun Sadat sedikit melonggarkan politiknya, pembatasan-pembatasan masih saja tetap terjadi. Salah satu contohnya adalah menyeleksi dengan ketat anggota-anggota NDP yang akan menjadi anggota Dewan Nasional. Selain itu, Sadat juga menyensor media massa bahwa tidak boleh ada media yang menghina atau mengkritisi pemerintahannya, namun, fokus utama politik pada masa Anwar Sadat adalah masalah Arab-Israel.<sup>37</sup> Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Camp David di AS. Kemudian dia berpidato di Knesset (DPR Israel) Jerusalem untuk menyampaikan pesan damai menyeluruh antara Arab-Israel sesuai Keputusan DK PBB No. 242 dan 338.<sup>38</sup>

Setiap tahunnya pemerintah melakukan peringatan hari kemenangan saat melawan Israel, 6 Oktober. Ketika sedang memperingati hari kemenangan tersebut pada tahun 1981, Anwar Sadat ditembak saat dilakukannya parade militer dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian tersebut, diangkatlah Hosni Mubarak, yang saat itu menjadi wakil presiden Mesir, menjadi presiden Mesir ketiga pada tanggal 14 Oktober 1981.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Hal ini dia lakukan karena ketika dia diangkat sebagai presiden Mesir menggantikan Nasser, dia tidak ingin dibayang-bayangi dengan kepemimpinan Nasser. Dia ingin membuat sebuah gerakan dan semangat baru yang dia namai dengan nama "Gerakan Pembaharuan". Tujuannya adalah untuk membalik kebijakan dari keotoriteran pemerintah Nasser. Selain itu, gerakan tersebut juga dimaksudkan untuk membangun ekonomi. Sumber: *Ibid.*, hlm.69.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>38</sup> Zulharbi Salim (2011), *Op cit.*, hlm. 174-175.

Di masa awal pemerintahannya, Mubarak perlahan mampu memperbaiki hubungan Mesir dengan dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, rakyat Mesir merasakan ketidakadilan, ketakbebasan, dan ketaktentraman selama Mubarak menjabat sebagai presiden. Akhirnya pada awal tahun 2011, Mesir kembali melakukan revolusi yang ketiga. Kali ini rakyat menuntut agar Mubarak turun dari jabatannya. Setelah melakukan demonstrasi besar-besaran, akhirnya Mubarak resmi mengundurkan diri sebagai seorang presiden pada tanggal 11 Februari 2011. Kemudian kekuasaan sementara diserahkan kepada militer.

## 1.2 Biografi Hosni Mubarak

Setelah mengetahui situasi daerah kekuasaannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah mengenal sosok presiden yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun tersebut. Oleh karena itu, perlulah sebelum menilik kebijakan penting tersebut, terlebih dahulu menjabarkan siapa Hosni Mubarak, bagaimana keluarganya, pendidikan, serta karirnya selama ini. Hal ini penting untuk dilakukan karena dari rekam jejaknya, kita dapat mengetahui siapa dia dan faktor apa saja yang mempengaruhi dia menjadi sosok Hosni Mubarak serta pemikirannya.

Nama lengkap Hosni Mubarak adalah Muhammad Hosni Said Muhammad. Dia lahir di Kafr-El Meselha, Al Monufiyah, 4 Mei 1928. Dia merupakan anak dari seorang pegawai biasa di Kementerian Kehakiman Mesir. Sewaktu kecil dia bercita-cita menjadi seorang da'i yang merupakan keinginan ibunya, sedangkan ayahnya menginginkannya menjadi seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari ayahnya di Kementerian Kehakiman Mesir.<sup>39</sup>

Ibunya sangat menginginkan Mubarak untuk menjadi pejuang Islam, sedangkan ayahnya ingin dia menjadi seorang pembela Mesir. Akhirnya Mubarak berkata kepada ibunya bahwa menjadi seorang da'i tidaklah harus selalu berkutat pada agama, tapi juga bisa dengan cara menduduki kursi pemerintahan.<sup>40</sup>

Hosni Mubarak memiliki seorang istri bernama Suzanne Thabet. Dia merupakan gadis blesteran Mesir Inggris. Suzanne merupakan seorang wanita berpendidikan tinggi, dia merupakan alumnus *American University in Cairo*.

<sup>39</sup> David Akhmad Ricardo (2011), *Op cit.*, hlm 29.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Pernikahannya dengan Suzanne dikaruniai dua orang putra. Putra pertama bernama Alaa dan putra keduanya bernama Gamal. Alaa Mubarak tidak mengikuti jejak ayahnya untuk terjun di dunia politik. Ia lebih memilih berkarir di dunia perbankan.

Hosni Mubarak menjalani sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Shabin El-Koum. Semasa kecil dia selalu menuruti kata ibunya bahwa dia harus menghafal Al-Qur'an dan membaca buku-buku Islam untuk memperdalam wawasannya tentang Islam. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Mubarak melanjutkan pendidikannya ke akademi militer. Pada tahun 1949 dia menyelesaikan pendidikan militernya di Kairo saat berusia 21 tahun dengan pangkat Letnan Dua.<sup>41</sup>

Pada tahun 1950 Mubarak melanjutkan pendidikan militernya ke pendidikan Angkatan Udara dan mendapatkan gelar sarjana dibidang ilmu penerbangan. Ketika lulus, dia berhasil menjadi salah satu dari 10 lulusan terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di angkatan udara, Mubarak dikirim ke Uni Soviet untuk memperdalam ilmunya dibidang Angkatan Udara di *Frunze General Staff Academy*.

Setelah bergabung dengan akademi militer FROUNZE di Uni Soviet, dia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo pada tahun 1964. Kemudian Mubarak juga dipercaya untuk menjadi Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Tahun selanjutnya, 1969, Mubarak diamanahkan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Pada tahun 1972-1975 Mubarak dipercaya untuk menjadi Deputy Menteri Perang pada masa pemerintahan Anwar Sadat.

Saat terjadi Perang Arab-Israel pada tahun 1973, Mubarak dipercaya untuk menjadi Komandan Angkatan Udara dan dinilai sangat sukses karena mampu menginstrusikan serangan udara awal yang menentukan segalanya dalam perang tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 1974 Mubarak dipromosikan untuk menjadi Letnan Jenderal. Setelah beberapa prestasi gemilang tersebut dia raih, Mubarak pun dipercaya untuk menjadi orang nomer dua di Mesir, yaitu sebagai Wakil Presiden Mesir pada tahun 1975 mendampingi Presiden Mesir,

---

<sup>41</sup> David Akhmad Ricardo (2011), *Op cit.*, hlm 31.

Anwar Sadat. Setelah itu Mubarak diangkat menjadi Presiden Partai Demokratik Nasional pada tahun 1979.<sup>42</sup>

Pada tanggal 6 Oktober 1981, pemerintah Mesir mengadakan acara Peringatan Hari Kemenangan yang diselenggarakan di depan Tugu “Jundul Majhul”, Nasr City, Kairo. Hari Kemenangan yang dimaksud adalah hari kemenangan ketika Anwar Sadat dan pasukannya berhasil melewati Terusan Suez untuk melawan Israel pada tahun 1973. Saat itu tiba-tiba terjadi peristiwa besar, yaitu Anwar Sadat ditembak oleh orang tidak dikenal dan akhirnya Sadat meninggal. Setelah kejadian tersebut, Majelis Al-Sya’ab dan Majelis Al-Syuura mengadakan sidang darurat untuk mengukuhkan Hosni Mubarak yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Mesir untuk naik tahta menjadi Presiden Mesir menggantikan Anwar Sadat.<sup>43</sup>

Adapun penghargaan yang dia dapat selama menjabat sebagai Presiden Mesir adalah *Man of Peace* tahun 1982, *Personality of The Year* tahun 1984, *Man of The Year* tahun 1985, Medali *Astrolabe* tahun 1989, Hadiah dari *Democratic Human Rights* tahun 1990, *Membership and Decoration “Honoris Causa”* tahun 1991, dan *UN Prize of Population* tahun 1994.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 32.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENTING HOSNI MUBARAK**

Kebijakan politik penting untuk diteliti agar mengetahui bagaimana pemerintahan seorang pemimpin negara. Kebijakan politik yang dibahas dalam penelitian ini hanya terfokus pada kebijakan penting politik dalam negeri. Melalui penerapan kebijakan ini, Mubarak mampu mempertahankan kekuasaannya selama 30 tahun. Selain itu juga karena didukung dengan kekuatan militer yang kuat.

#### **3.1 Kebijakan Politik**

Hosni Mubarak diangkat menjadi presiden bukan melalui proses pemilihan umum, namun menggantikan posisi Anwar Sadat yang dibunuh. Mubarak langsung melakukan perpanjangan Undang-Undang Darurat No. 162 Tahun 1958 yang disahkan setelah Perang Enam Hari, yaitu pada 1967. Adapun poin dari Undang-Undang tersebut adalah kekuasaan polisi diperpanjang, hak konstitusional ditangguhkan, sensor disahkan, dan pemerintah dapat memenjarakan individu tanpa batas waktu dan tanpa alasan.<sup>44</sup> Dalam bidang politik, Mubarak lebih melakukan modernisasi sesuai budaya Barat. Hal ini pula yang memicu munculnya beragam kelompok Islami dan semakin kuatnya kelompok Islam yang sudah ada.<sup>45</sup> Masalah politik dalam negeri yang membuat Mubarak repot adalah permasalahannya dengan para kelompok Islam, baik radikal maupun moderat. Ketika Mubarak diangkat menjadi presiden, dia berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan masalah sosial, berusaha untuk menindak korupsi, dan membebaskan ketua agama dan politik yang dipenjara saat pemerintahan Sadat.

Pada awal masa pemerintahan Mubarak, dia juga tidak banyak mengubah kebijakan Anwar Sadat dengan tujuan membuat sistem demokrasi yang sempurna dan rezim militer tetap mendapat dukungan dari rakyat Mesir dan juga

---

<sup>44</sup> Apriyadi Tamburaka (2011), *Op cit.*, hlm. 105-106.

<sup>45</sup> Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*. Trans. P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000. Trans. of *Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement*, 1997, hlm. 268.

internasional. Hosni Mubarak mencoba untuk lebih terbuka. Dia memperbaiki Dewan Rakyat Lokal<sup>46</sup> yang kini langsung bertanggung jawab kepada eksekutif. Kemudian dia juga mulai melibatkan wanita dalam pemerintahannya. Dia juga memiliki konsep untuk lebih mengendurkan batasan-batasan politik Mesir, termasuk terhadap oposisinya, namun pada kenyataannya gerakan politik dari oposisi Mesir tidak juga mengendur.<sup>47</sup>

Hingga 2011, Hosni Mubarak menjabat sebagai presiden dengan jangka waktu paling lama dalam sejarah Mesir. Dia memenangkan pemilu yang telah beberapa kali diselenggarakan, yaitu pada 1987, 1993, 1999, dan 2005. Hal ini dikarenakan Mesir memiliki aturan bahwa tidak ada batasan kepada presiden untuk terus menduduki jabatannya. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang digunakan Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya. Legitimasi Hosni Mubarak terhadap Mesir cukup berbeda dengan presiden sebelumnya. Dia mengatakan bahwa saat itu Mesir sedang dalam proses untuk menuju demokrasi yang sempurna karena Mubarak memang menginginkan demokrasi yang sesungguhnya, sempurna dan proporsional. Pengenalan akan demokrasi tersebut tidaklah mudah. Nilai-nilai demokrasi tersebut bukanlah berasal dari warga Mesir, namun berasal dari negara-negara Barat sehingga tentulah membutuhkan waktu yang sangat lama agar warga Mesir mampu menyerap nilai-nilai tersebut dengan sempurna.<sup>48</sup> Sejauh demokratisasi itu berjalan, rakyat Mesir dapat dikatakan cepat mengadaptasi nilai-nilai tersebut.

Semasa menjabat sebagai presiden, Mubarak juga menjabat sebagai ketua umum NDP (*National Democratic Party*). NDP sendiri mendapat dukungan yang sangat kuat dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sipil, hingga militer. Oleh sebab itu, NDP mampu menjadi partai penguasa yang terus bertahan dari awal hingga Mubarak lengser. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Undang Undang Pemilu 1984 yang mampu membuat NDP menjadi partai penguasa yang sangat kuat. Secara konseptual, partai selain NDP yang ingin mengikuti pemilihan umum dan mendapat kursi di parlemen minimal harus

---

<sup>46</sup> Dewan Rakyat Lokal adalah sebuah sistem yang membantu Gamal Abdul Nasser dalam bidang birokrasi maupun rakyat pendukungnya. Sumber: Dam Syamsumar & Agus R. Rahman (2001), *Op cit.*, hlm. 97.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

mendapat dukungan sebesar 8% dari jumlah suara nasional. Ditambah lagi tidak diberlakukannya sistem koalisi partai politik oposisi dalam pemilihan umum untuk memenuhi persyaratan tersebut.<sup>49</sup>

Sebagai implementasi dari proses demokrasi yang telah diungkapkan oleh Mubarak, dia tidak melarang legalitas *Wafd Party* (WP) sebagai oposisi. Dia bahkan mengizinkan berdirinya tiga partai baru yang mulai memasuki dunia perpolitikan Mesir pada 1990, yaitu *Green Party* (GP), *Democratic United Party* (DUP), dan *Young Egypt Party* (YEP). Sebelum itu, pada 1984 Mubarak juga mengizinkan berdirinya *New Wafd Party* (NWP) dan *Moslem Brotherhood* (MB). Pada 1997, tercatat 17 partai politik di Mesir yang berdiri sesuai dengan Undang-Undang Kepartaian No. 40 Tahun 1977.

Sejak 1987, Mubarak juga mengizinkan independen untuk mengikuti pemilihan umum.<sup>50</sup> Ikhwanul Muslimin juga diberikan kesempatan oleh Mubarak untuk terjun dalam kancah perpolitikan Mesir. Ikhwanul Muslimin diizinkan mengikuti berbagai pemilihan, termasuk pemilihan anggota parlemen di bawah panji-panji partai politik yang diakui secara resmi oleh pemerintah.<sup>51</sup> Hal-hal tersebut dimaksudkan agar rakyat Mesir dan dunia luar melihat bahwa Mubarak melakukan pemilihan umum yang bebas, terciptanya keragaman dalam politik Mesir serta adanya partai politik oposisi sebagai bentuk dari demokrasi. Kenyataan di lapangan adalah ketika dilangsungkannya pemilihan umum terdapat banyak kecurangan yang dilakukan. NDP melakukan intervensi birokrasi yang dilakukan dalam lingkup nasional. Hasilnya tentulah NDP selalu memenangkan pemilu dengan jumlah pemilih hampir dari dua per tiga dari suara nasional. Mubarak selaku pemimpin partai tersebut juga cukup berhati-hati dalam memilih orang-orang yang menjadi anggota partai yang kelak akan menjadi anggota Dewan Nasional.<sup>52</sup>

Berbeda dengan NDP sebagai partai berkuasa, partai-partai oposisi mendapat pembatasan-pembatasan dari pemerintah berupa dibatasainya “kontak” dengan suatu kelompok masyarakat atau kepentingan sebuah kelompok di Mesir.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

<sup>50</sup> Dam Syamsumar & Agus R. Rahman (2001). *Op cit.*, hlm. 94.

<sup>51</sup> Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. *Ekspresi Politik Mesir*. Trans. Rofik Suhud. Bandung: Penerbit Mizan, 1998. Trans. of *Muslim Politics*, 1996, hlm. 129.

<sup>52</sup> Dam Syamsumar & Agus R. Rahman (2001), *Op cit.*, hlm. 92-93.

Para pemimpin partai oposisi sebenarnya tidak menginginkan aturan tersebut. Mereka ingin mengkritisi pemerintahan Mesir yang sangat mengikat kebebasan di Mesir, termasuk dunia politiknya. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk diam daripada harus mengkritik pemerintah dan berakhir dengan diberangusnya partai politik mereka. NWP (*New Wafd Party*) segera mengatur strategi untuk menjadi partai oposisi terkuat di Mesir setelah pemilu pada 1984. Mereka membentuk menteri-menteri bayangan serta mekanisme-mekanisme lainnya untuk memperkuat peranannya sebagai partai oposisi Mesir yang nantinya dapat berujung sebagai partai alternatif di Mesir selain NDP.<sup>53</sup>

Sebagai negara yang sedang menjalani proses menuju demokrasi yang sempurna, Mubarak telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak lima kali, yaitu pada 1987, 1993, 1999, 2005, dan terakhir pemilihan anggota parlemen pada akhir 2010. Pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada 1993 terjadi konflik antara NDP dan partai oposisi. Penyelenggara pemilihan umum tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, bukan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pemerintah membuat dokumen kedua yang melibatkan ratusan hakim, pelaksana dari Kementerian Hukum, dan Kementerian Dalam Negeri. Partai oposisi tidak puas atas hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Mereka juga tidak menjamin dapat menjalankan pemilu dengan jujur. Akibatnya, hasil pemilu tersebut diboikot oleh partai oposisi, namun tetap saja hasilnya adalah NDP sebagai partai pemenang pemilu dan Hosni Mubarak kembali menjadi seorang presiden.<sup>54</sup>

Dalam setiap pemilu yang dilakukan, dapat diprediksi bahwa kemenangan sudah pasti milik NDP. Seperti pemilihan presiden pada 2005 dan pemilihan anggota parlemen pada September 2010 lalu. Dalam pemilihan umum tersebut dapat diprediksi bahwa mustahil calon presiden lainnya akan mengalahkan Mubarak. Hal ini disebabkan banyaknya kecurangan yang dilakukan Mubarak, salah satunya mengintimidasi pendukung kontestan oposisi agar memilih Mubarak sebagai presiden.<sup>55</sup> Setelah didesak oleh George W. Bush selaku presiden Amerika Serikat, Mubarak akhirnya menyelenggarakan pemilihan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>55</sup> "Senjakala Mubarak." *Tempo* 13 Feb. 2011, hlm. 21.

umum terbuka pada 2005. Dalam pemilu tersebut, Ikhwanul Muslimin diberikan kesempatan untuk mengikuti pemilu tersebut. Ketika mereka memenangkan 20% kursi di parlemen, Mubarak kembali membubarkan Ikhwanul Muslimin.<sup>56</sup>

Mubarak tidak menginginkan pemerintahannya digoyahkan oleh siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya. Segala cara dia lakukan agar dia tetap mempertahankan pemerintahannya. Mubarak tidak akan segan-segan menggunakan hukum untuk menindas lawan-lawan politiknya melalui aparatnya. Imbalannya, aparat penegak hukum ‘direstui’ untuk korupsi. Akibatnya tidak hanya kepada lawan politiknya, namun juga terhadap rakyat yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat akan semakin kuat.<sup>57</sup> Mubarak juga menerapkan kebijakan yang despotik, yaitu adanya Undang-Undang *security act* yang berisi bahwa pemerintah dengan bebas dapat menangkap siapa saja tanpa proses hukum.<sup>58</sup> Penjabaran-penjabaran tersebut dapat menggambarkan bahwa kondisi politik di Mesir cukup represif. Siapa saja yang menentang kebijakan Mubarak akan dihukum.<sup>59</sup>

Secara *de jure*, sistem pemerintahan Mesir adalah republik sejak 1952, namun secara *de facto* Mesir tidak dapat dikatakan negara republik karena negara dengan sistem republik adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Sedangkan pemerintahan Mubarak akan menindas siapa saja yang diduga mengguncang rezim kekuasaannya. Hal ini ditandai dengan terbatasnya ruang gerak wartawan dalam menulis berita yang tentunya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Selama Mubarak menjabat sebagai Presiden, dia tidak pernah sekalipun mengangkat Wakil Presiden. Amerika Serikat pernah memberi saran kepada Mubarak untuk mengangkat dua orang Wakil Presiden, satu berasal dari sipil dan satunya berasal dari Militer, namun Mubarak tidak menggubrisnya. Dalam tradisi politik Mesir, jabatan Wakil Presiden adalah jalan menuju Presiden.<sup>60</sup> Hal ini dapat dibuktikan ketika Anwar Sadat menjadi Wakil Presiden Gamal Abdul Nasser, dia naik menjadi seorang Presiden ketika Gamal Abdul Nasser wafat.

<sup>56</sup> Qaris Tajudin dan Akbar Pribadi Brahmana Aji (2011), *Loc cit.*, hlm. 101.

<sup>57</sup> Fuad Bawazier. “Revolusi Mesir: Pergantian Sistem.” *Republika* 14 Feb. 2011, hlm. 2.

<sup>58</sup> Sammy Abdullah. “Elbaradei Pun Pulang.” *Republika* 1 Feb. 2011, hlm. 2.

<sup>59</sup> Yeyen Rostiyani. “Kekayaan Rahasia Sang Firaun Modern” *Republika* 4 Feb. 2011, hlm.10.

<sup>60</sup> “Mesir Tidak Menentu.” *Kompas* 31 Jan. 2011, hlm. 10.

Begitu pula Hosni Mubarak, dia diangkat menjadi Presiden karena sebelumnya dia adalah Wakil Presiden.

Setelah sekian lama Mubarak menjadi presiden, semakin lama pula dia sibuk untuk menikmati dan menjaga kekuasaannya hingga lupa untuk menyejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Banyak rakyat Mesir yang berpendidikan rendah<sup>61</sup>, intel ada di mana-mana dan siap menangkap siapa saja yang tidak disukai oleh Mubarak. Misalnya terdapat 1.200 orang anggota Ikhwanul Muslimin yang sedang meringkuk di penjara. Secara politik, Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah kekuatan oposisi yang cukup kuat dan sangat efektif. Bahkan, seorang penulis di Mesir yang mengamati dan memahami masalah ini mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi kelompok alternatif Islamis yang berpengaruh tetapi antikekerasan.<sup>62</sup> Hebatnya, meskipun pemerintah Mesir menekan Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin tetap mendapatkan eksistensinya.

Dalam pemerintahannya, Mubarak menjalankan tiga fungsinya sebagai Presiden, yaitu menyejahterakan rakyat Mesir, menjaga kepentingan Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah, sesuai Perjanjian *Camp David*.<sup>63</sup> Mubarak mampu menjaga kestabilan Mesir. Dia melakukannya dengan menjalin hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat yang merupakan negara dan berkawan baik pula dengan Israel.<sup>64</sup> Beberapa kali dia melakukan berbagai perundingan dengan AS, antara lain pembahasan bantuan ekonomi militer AS kepada Mesir dengan George W. Bush di Gedung Putih Washington DC pada 4 April 1989, kemudian pembahasan perundingan damai di Timur Tengah dengan Bill Clinton di Kairo pada 2000, terakhir dengan Barack Obama untuk membahas perundingan damai antara Palestina dengan Israel yang bertempat di Gedung Putih Washington DC pada 1 September 2001.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> "Mubarak Didesak Turun." *Kompas* 27 Jan. 2011, hlm. 10.

<sup>62</sup> Fawaz A. Gerges. *Amerika dan Islam Politik*. Trans. Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. Jakarta: AlvaBet, 2002. Trans. of *America dan Political Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?*, 2002, hlm. 226.

<sup>63</sup> Agus N. Cahyo. *Tokoh Timur Tengah yang Diam-Diam Jadi Antek Amerika Serikat dan Sekutunya*. Jogjakarta: DIVA Press, 2011, hlm. 159.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163.

Sejak 1938, Ikhwanul Muslimin mulai memasuki ranah politik. Diawali dengan diterbitkannya Mingguan Al-Nadzir yang terkadang mengeluarkan ancaman akan “melawan politisi atau organisasi yang tidak mendukung Islam dan pemulihan kejayaannya”.<sup>66</sup> Di bawah kepemimpinan Al-Tilimsani, Ikhwanul Muslimin menerima pluralisme politik dan demokrasi parlementer. Ikhwanul Muslimin tidak bisa menjadi partai politik karena Undang-Undang Mesir. Oleh karena itu, mereka lebih memilih beraliansi dengan Partai Wafd saat pemilu 1984. Partai Wafd mendapat 65 kursi dari 459 dan memberikan 7 kursi untuk Ikhwanul Muslimin. Akhirnya persekutuan tersebut menjadi oposisi paling kuat menyaingi NDP. Menjelang 1987, koalisi tersebut berakhir dan Ikhwanul Muslimin memilih berkoalisi dengan Partai Buruh Sosialis dan Partai Liberal dalam pemilu 1987.<sup>67</sup>

Militer di Mesir berbeda dengan militer yang ada di negara-negara lain. Dapat dilihat dari keempat Presiden Mesir yang berasal dari kalangan militer. Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, militer di Mesir tidak hanya untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga memasuki berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh adalah militer diizinkan untuk mengelola berbagai macam industri di Mesir. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu sejarah singkat militer di Mesir.

Angkatan bersenjata Mesir lahir pada zaman Utsmani. Pada 1801-1830, mereka tidak aktif dalam menjalankan tugasnya karena adanya pengaruh Eropa dalam pembangunan Mesir, sehingga tentara milik negara tidak terlalu dilibatkan. Para perwira Mesir kemudian memulai untuk membentuk rasa nasionalisme. Para perwira yang sangat peduli dengan nasib bangsanya kemudian sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masa depan Mesir. Semakin lama mereka tidak hanya melibatkan sesama perwira angkatan tersebut saja, namun juga melibatkan senior dan junior mereka. Akhirnya, pada 1939 terbentuklah organisasi Perwira Bebas yang beranggotakan perwira angkatan bersenjata Mesir sekaligus menjadi organisasi rahasia pertama di Mesir. Adapun tokoh-tokoh dalam organisasi tersebut antara lain, Anwar Sadat, Abdel Munem Abdul Rauf, Abdil Lathif Al-Baghdadi, Hassan Ibrahim, Khaled Mukhieddin, Ahmed Saudi

---

<sup>66</sup> Esposito, John L. (ed). *Ensiklopedi Oxford “Dunia Modern Islam”* Jilid 2, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y. N. dkk. Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm 268.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 273

Hussein, dan Hassan Izzat. Organisasi inilah yang kemudian memicu Revolusi 1952 yang pada akhirnya menumbangkan rezim Raja Farouk.<sup>68</sup>

Militer di Mesir memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dengan negara lain. Militer di Mesir telah memasuki kawasan ekonomi dan politik. Pada 1981 dibuatlah UU Darurat Militer yang memberikan kekuasaan kepada untuk mengendalikan Mesir. Militer di Mesir menguasai serta mengelola aneka industri, mulai dari pariwisata, tekstil, otomotif, sampai produk perawatan rambut. Militer setempat mengelola industri mobil Hyundai, menghasilkan berbagai barang, mulai dari air minum kemasan, sup kalengan, minyak, hasil pertanian, sampai memproduksi gas alam. Otomatis hampir seluruh personil militer Mesir tersebar di segala penjuru industri di Mesir. Contoh lainnya adalah setelah peristiwa Luxor<sup>69</sup> 1997 yang menewaskan ratusan wisatawan asing dan warga sipil, Mubarak memecat Menteri Dalam Negeri, Al-Alfi, kemudian diambil alih oleh militer. Hal tersebut adalah kejadian pertama kali ketika tentara menjaga situs-situs bersejarah dan turisme yang sebelumnya dilakukan oleh polisi.<sup>70</sup> Kuatnya posisi militer ini ditandai dengan adanya kenyataan bahwa semua Presiden Mesir berasal dari militer, yaitu Muhammad Naguin, Gamal Abdul Nasser, dan Hosni Mubarak.

Keadaan Mesir pada zaman Mubarak merupakan keadaan yang sangat nyaman untuk para tentara militernya. Bagaimana tidak, perdamaian telah terwujud, tidak ada lagi permusuhan dengan Israel. Mereka tidak lagi ‘memegang’ senjata. Tentara kalangan atas tentulah hidupnya menjadi sangat sejahtera, mereka disebut juga dengan kalangan “militer berdasar”. Berbekal kekuasaan dan kekuatan politik, usaha yang dijalankan oleh militer tentulah sangat berkembang pesat. Para “tentara berdasar” pun tidak perlu membayar pajak ataupun lisensi usaha mereka. Sedangkan nasib yang berbeda dialami tentara kelas bawah yang tidak menjalani kemewahan seperti tentara berpangkat tinggi.<sup>71</sup>

Militer Mesir memiliki 468.500 personel aktif dan 479.000 personel cadangan. Angkatan Darat terdiri dari 340.000 personel dan memiliki 3.050 tank tempur, 5.182 kendaraan lapis baja, dan 4.413 artileri. Untuk Angkatan Laut,

<sup>68</sup> Dam Syamsumar & Agus R. Rahman (2001), *Op cit.*, hlm.74-76.

<sup>69</sup> Peristiwa Luxor adalah pengeboman yang dilakukan oleh kelompok Al Jamaah Wa Jihad di Kairo. Sumber: Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 222

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>71</sup> Abdullah Sammy. “Negosiasi Mesir Gagal.” *Republika* 8 Feb. 2011, hlm. 8.

terdiri dari 18.500 personil dan memiliki 4 kapal selam, 1 kapal *destroyer*, 10 kapal frigat, 12 kendaraan amfibi, serta 41 helikopter unit patrol. Sedangkan untuk Angkatan Udara, terdiri dari 30.000 personil dan memiliki 400 pesawat tempur, lebih dari 53 pesawat angkut, 328 pesawat latih, dan 258 helikopter. Mesir juga memiliki 80.000 personel untuk pertahanan udara dengan lebih dari 72 sistem pertahanan, lebih dari 702 rudal darat ke udara dan lebih dari 1.566 meriam antipesawat.<sup>72</sup>

Militer Mesir mengeluarkan dana sebesar US \$ 4.143 miliar pada 1985 dan US \$ 3.583 miliar pada tahun 1991 untuk bidang pertahanan. Sedangkan jumlah tentara pada 1985 sebanyak 445.000 dan 410.000 pada 1991. Mubarak juga mengimpor senjata konvensional sebanyak US \$ 10.957 miliar pada 1987-1991.<sup>73</sup>

### **3.2 Kebijakan Dalam Bidang Agama**

Mesir identik dengan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Al-Azhar sebagai pusat perkembangan agama Islam di dunia. Selain itu Mesir juga merupakan tempat lahirnya Ikhwanul Muslimin yang pengaruhnya terus menyebar luas ke penjuru dunia. Saat Mubarak menjadi Presiden, dia melakukan berbagai kebijakan dan tindakan dalam bidang agama dalam mempertahankan kekuasaannya.

Islam merupakan agama negara yang resmi dan disahkan oleh negara. Mayoritas penduduk Mesir menganut agama Islam. Konstitusi Mesir memberlakukan syari'at Islam sebagai dasar konstitusi negara. Kemudian agama yang juga diakui Mesir adalah Kristen, khususnya Kristen Koptik. Kristen Koptik merupakan agama tertua sekaligus agama asli orang-orang Mesir. Penganutnya sekitar 10%. Di Mesir juga bermunculan berbagai aliran-aliran agama, salah satunya adalah Aliran Baha'i. Aliran ini mengakui nabi-nabi agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Mereka berpendapat bahwa Muhammad bukanlah nabi terakhir. Aliran ini dianut ribuan orang di Mesir. Selain itu, di Mesir juga terdapat kalangan Qo'ranihin. Kalangan ini hanya berjumlah puluhan orang. mereka hanya percaya Al-Qur'an tetapi tidak mempercayai Hadist Rasul.

<sup>72</sup> Abdullah Sammy dan Hiru Muhammad. "Militer Mesir Turun Tangan." *Republika* 12 Feb. 2011, hlm. 7.

<sup>73</sup> John L. Esposito, Jilid 1, (2001), *Loc cit.*, hlm. 138.

Dalam Konstitusi Mesir artikel 46 dituliskan bahwa “Negara menjamin kebebasan warganegara untuk memeluk kepercayaan dan kebebasan untuk mempraktekan kepercayaannya”. Sedangkan dalam konstitusi Mesir artikel 40 dikatakan bahwa “Semua warganegara bersifat sama dihadapan hukum.” Semua harus menaati hukum yang ada tanpa membedakan bahasa, etnik, agama, maupun keyakinan dihadapan hukum. Jika seseorang terbukti bersalah dan melanggar hukum, maka dia harus menerima serta menjalani hukuman sesuai konstitusi, tidak peduli siapa dia. Aturan ini terus berlangsung sampai saat ini, tidak terkecuali pada pemerintahan Hosni Mubarak.

### 3.2.1 Islam

Pada awal masa pemerintahannya, Mubarak mulai menggencarkan demokratisasi yang sudah dimulai sejak zaman Anwar Sadat. Mubarak memberikan perlakuan yang baik kepada kehidupan Islam. Dia mengizinkan Islam untuk tetap memasuki ruang publik, contohnya tokoh Islam terkemuka diizinkan untuk menduduki kursi parlemen, mendapatkan peran penting dalam lembaga profesional, serta usaha-usaha bidang penerbitan. Kemudian masjid yang fungsi awalnya adalah hanya untuk tempat solat, Mubarak meluaskan fungsinya yang di dalamnya terdapat klinik medis, dan fasilitas pelayanan masyarakat dengan harga murah namun berkualitas tinggi.

Mubarak juga menepati janjinya untuk membebaskan para pemuka agama yang dipenjarakan pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Mubarak membebaskan ‘Abdul Hamid yang telah dipenjarakan sejak awal September 1981, sebelum Sadat dibunuh, hingga 25 Januari 1982.<sup>74</sup> ‘Abdul Hamid adalah seorang mubaligh termahsyur di Mesir. Lahir pada tahun 1933 di Syubrakhit. Semenjak 5 Mei 1963 hingga 28 Agustus 1981, dia menjadi khotib independen di Masjid ‘Ain Al-Hayah yang juga dikenal dengan nama Masjid Al-Malik di Jalan Mishrwa Al-Sudan. Dari sinilah popularitas dan kemahsyurannya didapat. Pada masa Gamal Abdul Nasser dia dipenjarakan beberapa lama karena tidak mau membeirkan fatwa tentang hukuman mati. Zaman Anwar Sadat dia mengkritik pemerintahan yang melenceng dari norma agama, namun Sadat lebih toleran dengan cara tidak menahannya.

---

<sup>74</sup> John L. Esposito, Jilid 3, (2001), *Loc cit.*, hlm. 231.

Pada 1981 dia kembali dipenjara bersama orang Mesir lainnya dan masuk daftar “tahanan pencegahan”.<sup>75</sup> Kemudian Mubarak juga mengizinkan partai-partai politik yang berbau Islami, diberikan jatah kursi di parlemen.

Meskipun Mubarak lebih terbuka dan mengizinkan Islam bergerak bebas, kelompok Islam radikal masih terus ada dan membayangkan serta mengancam pemerintahannya. Kelompok Islam radikal memang mengancam rezim pemerintahan presiden sejak rezim Gamal Abdul Nasser. Salah satu contoh kelompok tersebut adalah Al-Jihad yang senang memberikan kejutan-kejutan dan pembunuhan untuk merongrong pemerintah Mubarak serta menimbulkan kekacauan sosial yang kemudian akan terbukalah peluang agar kelompok Islam militan menguasai Mesir.<sup>76</sup> Adapun kelompok-kelompok Islam yang berada di Mesir antara lain, Al-Jihad, Jund Allah, Jaisy Al-Tahrir Al-Islami, Jam’iyah Al-Tablig, Al-Takfir wa Al Hijrah, dan Jamaah Al-Islamiyah.<sup>77</sup> Kelompok yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya satu dari kelompok-kelompok tersebut yang dianggap paling menonjol diantara kelompok yang lainnya adalah Al-Jamaah Wa Jihad. Sejak 1981, Islam mulai bergerak dengan cara masuk ke dalam arus utama dan pelembagaan aktivitas Islam. Dalam dunia Islam di Mesir, terdapat kelompok-kelompok lain yang juga memiliki pengaruh penting dalam pemerintahan, yaitu Al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin.

### 3.2.1.1 Al-Jamaah Wa Jihad

Dalam mempertahankan kekuasaannya, Mubarak melakukan bernagai tindakan terhadap kelompok Al-Jamaah Wa Jihad. Kelompok Islam radikal yang telah muncul sejak rezim gamal Abdul Nasser memang mampu menjadi sebuah ancaman yang membuat Presiden resah akan pemerintahannya. Dia takut pada suatu hari nanti kelompok radikal Islamis menumbangkan kekuasaannya dan menggantikan posisinya untuk menguasai Mesir. Memang itulah yang diharapkan kelompok Islam radikal. Sebuah surat kabar di Inggris, *Sunday Times*, dalam kolom *National Intelligence Estimate* yang merepresentasi masukan kolektif dari semua dinas (*agencies*) Amerika Serikat yang terbit pada tahun 1993 meramalkan

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> John L. Esposito, Jilid 4, (2001), *Loc cit.*, hlm. 56.

<sup>77</sup> John L. Esposito, Jilid 2, (2001), *Loc cit.*, hlm. 274.

bahwa teroris-teroris fundamentalis Islam akan terus mengambil keuntungan di seluruh Mesir, dan mengarah untuk menjatuhkan pemerintah Hosni Mubarak.<sup>78</sup>

Mubarak cukup berhasil dalam menangani kelompok Islam radikal. Dia mampu membendung kampanye kekerasan yang dilakukan oleh *Al-Jamaah wa Jihad* yang sudah berlangsung selama tujuh tahun. Mubarak memang mampu menekan itu semua, namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya para radikal Islamis itu mampu memperkuat kekuatannya sehingga anggota mereka semakin bertambah? Mubarak ternyata kurang mampu merangkul rakyat menengah ke bawah dan justru mereka dikucilkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan kelemahan sistem politik, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakterampilan pemerintah dalam mengurus ekonomi, ketergantungannya pada bantuan luar negeri dan sifat menghambanya kepada Amerika Serikat Serikat yang berakibat tidak adanya legitimasi.<sup>79</sup>

Melihat hal tersebut, akhirnya Mubarak memilih jalan untuk menjauh dari sekularisme dan mengubah berbagai hal menjadi lebih Islami, termasuk bidang politik. Tentu saja dia melakukannya untuk menekan kekerasan dari kelompok Islam radikal sehingga pemerintahnya menjadi jauh lebih aman dari sebelumnya. Kebijakan Mubarak tersebut dapat dilihat dari bidang pendidikan dan komunikasi, khususnya televisi yang memang menjadi sarana penting untuk membentuk opini publik. Kebijakan tersebut pada akhirnya mampu membentuk karakter rakyat Mesir untuk menjadi lebih Islami. Maksud dari Mesir menjadi lebih Islami adalah Mubarak lebih memberikan kebebasan kepada rakyat Mesir dalam melaksanakan segala perintah Islam. Dapat dilihat dari wanita bercadar dan lelaki berjanggut lebat lalu lalang tidak hanya di kota saja, namun hingga pelosok desa. Sampai-sampai Mubarak sempat melambatkan liberalisasi ekonomi yang dia canangkan untuk lebih memfokuskan diri mengurus kelompok Islam radikal yang membuatnya kerepotan.<sup>80</sup> Pendekatan yang dilakukan Mubarak tidak begitu berhasil. Kisruh antara pemerintahan Mubarak dengan kelompok Islami tersebut mampu menyedot perhatian kelompok maupun organisasi di Mesir maupun organisasi luar negeri. Hal tersebut berdampak pada berbagai aspek, yaitu

---

<sup>78</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 221.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

ekonomi, politik, sosial, dan agama. Adapun penyebab dari munculnya kelompok Islam radikal adalah akibat dari merosotnya ekonomi, mundurnya legitimasi dan otoritas Mesir.<sup>81</sup>

Akhirnya, Mubarak tidak tahan dengan kegiatan dan berbagai hal lain yang dilakukan oleh kelompok Islam. Dia menurunkan pasukan keamanan untuk menumpas kelompok Islam, baik moderat<sup>82</sup> maupun radikal.<sup>83</sup> Ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa Luxor yang dilakukan oleh Al-Jamaah wa Jihad pada November 1997 yang menewaskan ratusan turis asing dan warga sipil Mesir, membuat Mubarak geram. Dia benar-benar tidak mau berdialog dengan siapapun, termasuk kelompok Islam moderat. Dia mengatakan bahwa dia telah berdialog selama 14 tahun dengan kelompok Islam radikal dan tiap kali mereka berkomunikasi, mereka menjadi semakin kuat. Bahkan, Mubarak juga mengatakan bahwa berdialog dengan mereka sama saja dengan berdialog dengan orang tuli.<sup>84</sup>

Pada awal 1990, Clinton mengatakan kepada Mubarak bahwa dia harus menangani penyebab munculnya gerakan Islamis, yaitu pemerintahan yang tidak representatif, tingkat pengangguran yang membengkak, korupsi, dan menurunnya kondisi kehidupan rakyat. Mubarak dengan halus menolak saran dari Amerika Serikat tersebut karena dia tidak mau mengalami hal sama dengan Aljazair. Kelompok Islam militan di sana mampu memenangkan pemilu. Bahkan mantan Menteri Dalam Negeri Mesir, Jenderal Musa, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kelompok Islam radikal di Mesir untuk memenangkan pemilu.<sup>85</sup>

Mubarak dinilai sukses oleh Amerika Serikat dalam mengatasi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal di Mesir. Pada 1996, pemerintah Mesir berhasil mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalahkan kelompok Islam radikal yang selama hampir tujuh tahun menggempur pemerintah

<sup>81</sup> Jeff Haynes (2000), *Op cit.*, hlm. 263.

<sup>82</sup> Moderat adalah selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yg ekstrem; 2 berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sumber: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 1.035.

<sup>83</sup> Awalnya dia masih menyambut baik akan kehadiran Ikhwanul Muslimim yang dia anggap sebagai kelompok Islamis moderat. Mubarak menuduh Ikhwanul Muslimin telah bersekongkol dengan Al-Jamaah wa jihad untuk melakukan terorisme. Sumber: Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 221.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 222-223.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

Mesir untuk menyingkirkan rezim Mubarak yang sekular untuk kemudian diganti menjadi negara Islam.<sup>86</sup>

Pengumuman kemenangan Mesir melawan kelompok Islam radikal langsung dipatahkan oleh mereka. Pada September dan November 1997, wisatawan asing yang sedang berada di depan museum Mesir berhasil diserang dengan brutal oleh para kelompok Islam radikal di pusat kota Kairo dan Luxor. Kejadian tersebut mengakibatkan tewasnya ratusan warga sipil dan wisatawan asing. Penyerangan tersebut merupakan pertanda bahwa sebenarnya Al-Jamaah wa Jihad masih ada dan memiliki kekuatan.<sup>87</sup>

Serangan Luxor tersebut ternyata memiliki dampak yang cukup banyak dan penting. Berbagai organisasi Mesir mengecam keras Al-Jamaah Wa Jihad atas tindakannya tersebut, seperti Ikhwanul Muslimin, organisasi-organisasi madani, partai politik, dan tokoh agama. Tidak hanya dalam negeri, pihak luar negeri pun ikut mengecam keras serangan tersebut. Presiden Iran, Mohammad Khatami, yang mengirim surat kepada Mubarak yang mengatakan bahwa serangan tersebut adalah tindakan yang buas dan pengecut. Kemudian Presiden Sudan, Omar Hassan Al-Bashir, yang menegaskan bahwa serangan tersebut adalah serangan kriminal dan buas yang tidak pernah dibenarkan dalam Islam, Hamas di Palestina, dan juga FIS Aljazair<sup>88</sup> yang menentang segala bentuk apapun yang melakukan tindak kejahatan kepada warga sipil. Mubarak tidak mau kalah dalam mengecam serangan tersebut. Dia tidak takut terhadap Al-Jamaah Wa Jihad dan justru semakin geram terhadap kelompok Islam radikal. Dia kemudian memecat Menteri Dalam Negeri, Al-Alfi, dan diambil alih oleh militer. Kejadian tersebut bahkan digunakan Mubarak untuk mengambil hati rakyat Mesir dan membuat kelompok Islamis semakin khawatir, Mubarak akan semakin represif dalam pemerintahannya.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 231-232.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 233-234.

<sup>88</sup> FIS Aljazair adalah singkatan dari *Front Islamique du Salut* atau dalam bahasa Indonesianya Front Pembebasan Islam. FIS adalah kelompok Islam dominan di Aljazair yang memenangkan pemilu Aljazair pada Desember 1991 yang menuntut pengubahan Republik Demokrasi Aljazair menjadi sebuah negara Islam. Sumber: Dale F. Eickelman dan James Piscatori (1996), *Op cit.*, hlm. 44-45.

<sup>89</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 234-236.

Kelompok Islam sendiri mampu menarik perhatian rakyat Mesir menengah ke bawah dengan memanfaatkan kondisi ekonomi saat itu. Terdapat berbagai tempat di Kairo yang tidak mendapatkan pelayanan yang layak dari Mubarak. Kemudian kelompok Islam masuk dan membantu mereka dengan memberikan pelayanan sosial dan kesehatan yang tidak bisa diberikan oleh Mubarak. Mereka juga menanamkan ideologi dengan dasar yang kokoh, yaitu dengan kumpulan kekecewaan terhadap korupsi yang semakin merajalela, westernisasi, dan tidak adanya kesalihan antara kelompok muslim di Mesir.<sup>90</sup> Terlebih lagi kelompok Islam mampu memberikan bantuan darurat secara cepat dan tanggap ketika terjadi gempa bumi pada Oktober 1992.<sup>91</sup> Kemudian dalam survei yang diadakan pada 1988, sebanyak 82% mahasiswa Universitas Kairo berpandangan bahwa kelompok Islam seharusnya tidak dilarang oleh pemerintah Mesir karena mereka memberikan sumbangan dalam perbaikan sosial dan kebangkitan Islam.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, Mubarak kerepotan dalam menangani kelompok-kelompok Islam yang ada di Mesir. Kelompok-kelompok islam tersebut ingin menguasai Mesir. Mubarak yang merasa kekuasaannya terancam melakukan berbagai cara, mulai dari diskusi, membuat Mesir menjadi lebih Islami, sampai dengan cara menangkap dan menghukum anggota kelompok tersebut. Itulah cara yang digunakan Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya dalam bidang agama. Kebijakan tersebut tidak selalu berhasil, bahkan beberapa kali membuat kelompok Islam makin geram dan membalasnya dengan berbagai tindakan.

### 3.2.1.2 Al-Azhar

Al-Azhar memiliki peranan yang penting, tidak hanya di Mesir namun juga di seluruh dunia. Dalam subbab ini dijelaskan sekilas tentang bagaimana peranan Al-Azhar di Mesir. Hosni Mubarak juga melakukan berbagai tindakan dan kebijakan terhadap Al-Azhar. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah singkat berdirinya Al-Azhar.

---

<sup>90</sup> Jeff Haynes (2000), *Op cit.*, hlm. 264.

<sup>91</sup> Dale F. Eickelman dan James (1996), *Op cit.*, hlm. 137.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Al-Azhar dipancangkan untuk pertama kalinya pada Senin, 24 Jumada Al-Ula 359 H/ 4 April 970 oleh Jauhar Al-Shiqli selaku panglima Dinasti Fathimiyyah yang memimpin penaklukan Mesir. Akan tetapi, bangunan itu awalnya hanya dibuka sebagai masjid, yaitu pada Jumat, 7 Ramadhan 361 H/ 22 Juni 972 M. Kemudian pada bulan Ramadhan 365 H/ Oktober 975, Al-Azhar kedudukannya berubah menjadi lembaga pendidikan. Al-Azhar berarti ‘yang cemerlang’. Al-Azhar Al-Syarif dikepalai oleh seorang Syaikh Al-Azhar dan pengasuh pertama Al-Azhar adalah Abu Alhasan ‘Ali ibn Al-Nu’man Al-Qairuwani yang berasal dari Tunisia. Pengasuh pertama tersebut berasal dari Tunisia karena pada saat itu Dinasti Fathimiyyah baru saja pindah dari Tunisia. Kepindahan dari Tunisia membawa para ulama dan ilmuwan. Kajian-kajian yang dilakukan pada awal masa berdirinya lembaga pendidikan ini adalah seputar materi-materi agama, bahasa, logika, dan astronomi. Salah satu pengajarnya adalah Menteri Abu Al-Faraj Ya’qub ibn Yusuf ibn Killis. Yang mengajar *ushul fiqih* dengan berpedoman pada *Kitab Al-Risalah Al-‘Aziziyah*.<sup>93</sup>

Memasuki zaman modern, Al-Azhar melakukan pembenahan dalam berbagai hal. Al-Azhar memberikan gelar *Al-‘alamiyah* kepada para lulusannya. Pada 1961, Mesir mengeluarkan Undang-Undang yang mengubah Al-Azhar menjadi universitas yang modern, namun tetap memelihara hal-hal tradisional serta ciri khas Al-Azhar, yaitu tetap mengadakan kajian keislaman dan berbahasa Arab. Berbagai fakultas dalam berbagai bidang satu per satu dibangun, mahasiswa yang berasal dari luar negeri semakin bertambah dan Al-Azhar menjadi universitas keagamaan dan ilmiah yang sangat unik. Al-Azhar dipimpin oleh seorang “Syaikh Al-Azhar” sejak 1690 dan Syaikh pertamanya adalah Syaikh Muhammad ‘Abdullah Al-Kharrasyi.

Sejak 1981-1991, Mubarak mempertahankan simbiosis mutualisme yang baik dengan Al-Azhar. Al-Azhar sebenarnya mengalami hal yang dilematis, yaitu antara mengkritik pemerintah atau tunduk terhadap perintah negara. Pada akhirnya, Al-Azhar mengikuti perintah dari pemerintah Mubarak. Bukti konkretnya adalah pihak berwenang Al-Azhar mengeluarkan fatwa yang mengabsahkan keluarga berencana, perjanjian damai Mesir-Israel, dan keterlibatan Mesir dalam Perang

<sup>93</sup> Ahmad Rofi ‘Usmani. *Dari Istana Topkapi Hingga Eksotisme Masjid Al-Azhar*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011, hlm. 28-29.

Teluk. Al-Azhar juga menolak untuk memberikan fatwa terkait biaya bunga atas dana yang diinvestasikan untuk pembangunan nasional, seperti yang diinginkan oleh pemerintah.<sup>94</sup>

Kini Al-Azhar menjadi sebuah universitas dan masjid terbesar yang berada di Mesir. Letaknya berada di pusat Kairo. Universitas sekaligus masjid ini hingga kini menjadi titik pusat kehidupan beragama dan budaya Islam bagi Mesir dan seluruh dunia Islam. Al-Azhar ketika masa pemerintahan Hosni Mubarak memiliki peranan yang tidak kalah penting. Mubarak juga terus berusaha mendekatkan diri pada kelompok-kelompok Islam, baik kepada kelompok Islamis maupun rakyat madani. Mubarak ingin menunjukkan kepemimpinannya yang lebih baik dari pemimpin-pemimpin Mesir sebelumnya.

Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1988 mengungkapkan respon masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan Al-Azhar. Dalam survey tersebut dapat diketahui bahwa para mahasiswa Universitas Kairo merasa kecewa terhadap lembaga keagamaan resmi dan mengimplikasikan kepada kelompok Islami. Sebanyak 75% mahasiswa yang disurvei menganggap bahwa Al-Azhar kurang atau sama sekali tidak efektif dalam merespon kebutuhan pemuda Mesir, sedangkan 70% menginginkan agar Al-Azhar lebih aktif memberikan penyelesaian-penyelesaian dalam masalah-masalah sosial.<sup>95</sup> Survei ini membuktikan bahwa peran Al-Azhar selama pemerintahan Mubarak tidak terlalu berpengaruh dalam masyarakat. Al-Azhar hanyalah terfokus terhadap dunia pendidikan semata.

### 3.2.1.3 Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin memiliki peranan yang signifikan di Mesir bahkan di luar negeri. Kelompok Islam moderat ini berkecimpung tidak hanya dalam bidang agama, namun juga ikut serta dalam bidang politik. Meskipun secara teoritis nasionalisme dan Islam seharusnya terpisah, Ikhwanul Muslimin mampu menjalankannya secara bersamaan. Kehadiran Ikhwanul Muslimin membuat Hosni Mubarak resah. Kegiatan-kegiatannya dianggap mengancam kekuasaan

<sup>94</sup> John L. Esposito, Jilid 1, (2001), *Loc cit.*, hlm. 232.

<sup>95</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori (1996), *Op cit.*, hlm. 133.

Mubarak di Mesir. Berbagai kebijakan juga dilakukan terhadap kelompok Islam moderat tersebut.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi agama Islam yang religius dengan tujuan menyebarkan Islam dan berakhlak yang mulia. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir pada 1928. Sejak organisasi ini berdiri, sasarannya adalah sosial dan politik, namun tetap berbasis Islam. Hasan Al Banna adalah pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia lahir pada Oktober 1906 di Buhairah, timur laut Kairo. Ayahnya seorang imam dan pengajar di masjid. Ketika berumur belasan tahun, dia mulai mempelajari sufi, mengajar, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Gabungan dari berbagai pengaruh, mulai dari sufisme, pemikiran Muhammad Rashid Ridha dan gerakan Salafiyah, nasionalisme hingga ajaran dari ajaran ayahnya, membuat Al-Banna membuat sebuah pemikirannya sendiri. Sewaktu menjadi seorang pengajar, dia banyak bergaul dengan masyarakat setempat. Pada 1927, Al-Banna mendukung berdirinya Ikatan Pemuda Muslim di Kairo dan pada tahun 1928, dia mendirikan jamaahnya sendiri yang bernama Ikhwanul Muslimin. Dia terbunuh oleh polisi pada 12 Februari 1949.<sup>96</sup>

Dalam pergerakannya, Ikhwanul Muslimin menggunakan konsep ketaatan kepada pemimpin dan pola organisasinya yang ketat yang menghubungkan pimpinan tertinggi sampai satuan terkecil, seperti keluarga.<sup>97</sup> Organisasi ini juga mencakup hubungan yang cukup luas, mulai dari teknis dan komite maupun dewan penasihat. Ikhwanul Muslimin telah memiliki lebih dari 300 cabang yang menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Ikhwanul Muslimin juga mendirikan pabrik, perusahaan, sekolah, dan rumah sakit sendiri.<sup>98</sup>

Ikhwanul Muslimin memiliki daya tarik yang kuat. Banyak kalangan masyarakat Mesir yang mendukung mereka, mulai dari guru besar, mahasiswa, dokter, pengacara sampai kaum profesional lainnya. Meskipun pemerintahan melarang dan menyatakan tidak sah, organisasi ini tetap diterima secara *de facto*. Ikhwanul Muslimin juga mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kelompok-kelompok Islam secara umum mampu memperoleh legitimasi dan pengaruh positif yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

---

<sup>96</sup> John L. Esposito, Jilid 2, (2001), *Loc cit.*, hlm. 271-272.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 267-268.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 271

menjalankan misinya, Ikhwanul Muslimin bekerja melalui organisasi-organisasi sah yang ada di Mesir.<sup>99</sup>

Pada saat Mubarak sibuk menumpas kelompok Islam radikal, Ikhwanul Muslimin memosisikan diri mereka menjadi sebuah kekuatan politik alternatif dan bersuara moderat. Ikhwanul Muslimin memang menjadi pihak yang diuntungkan dalam permasalahan tersebut, namun dia juga tidak bisa luput dari kecaman pemerintahan Mubarak. Akan tetapi, meskipun Mubarak berusaha menumpas mereka, hal itu tidak membuat Ikhwanul Muslimin ini hancur.<sup>100</sup> Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi yang cukup unik. Dia merupakan sebuah organisasi yang berkecimpung di dunia keagamaan, dalam hal ini adalah Islam, sosial, dan politik.

Ikhwanul Muslimin terkadang memilih menggunakan cara kekerasan untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Ikhwanul Muslimin juga seringkali menyesuaikan strateginya dengan angin politik yang sedang berhembus.<sup>101</sup> Hal ini dibuktikan saat Ikhwanul Muslimin mencoba mengambil hati Mubarak ketika pemerintahan Mesir sedang bersitegang dengan kelompok Islam radikal. Ketika itu Ikhwanul Muslimin muncul sebagai sebuah organisasi Islam moderat.

Dalam pemerintahannya, Mubarak menjalin hubungan yang dapat dikatakan cukup baik dan lebih akomodatif dengan pihak oposisinya, yaitu dengan memberi ruang kepada mereka agar pihak oposisi dapat menyalurkan aspirasinya. Hal ini dilakukan Mubarak karena dia sadar bahwa 'Kebangkitan Islam' bukanlah kekuatan asing yang merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan sebelumnya yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak unsur sesuai perkembangan demokrasi dan kapitalisme. Keleluasaan yang diberikan oleh Mubarak agar Ikhwanul Muslimin dapat bekerja sama dengan pemerintah supaya tidak memunculkan kelompok Islam yang lebih radikal tidak lagi menentang pemerintahan Mubarak, namun pemerintah sendiri akan membatasi gerak-gerak Ikhwanul Muslimin agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 274-275.

<sup>100</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 226.

<sup>101</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori (1996), *Op cit.*, hlm. 154.

Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam politik Mesir. Pemerintah Mesir memang tidak mengakui Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah partai politik, namun diakui sebagai semi organisasi. Pemerintahan Mubarak juga mengizinkan Ikhwanul Muslimin untuk ikut dalam pemilihan umum parlemen dan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Pada 1980 sampai 1990, Ikhwanul Muslimin lebih menunjukkan eksistensinya dalam bidang agama, baik secara moderat maupun militan.<sup>102</sup> Pada Agustus 1995, Mubarak menangkap ratusan aktivis Ikhwanul Muslimin ke pengadilan militer yang biasanya digunakan untuk mengadili para tersangka teroris. Dia juga menginstruksikan agar membubarkan organisasi-organisasi yang dikelola oleh Ikhwanul Muslimin untuk membatasi kegiatan politik mereka.<sup>103</sup>

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Mubarak juga melakukan tindakan dan kebijakan terhadap Ikhwanul Muslimin. Berbeda dengan Al-Jamaah Wa Jihad, Ikhwanul Muslimin lebih moderat. Dalam hal ini, Mubarak sempat memberikan keleluasaan terhadap kegiatan-kegiatan Ikhwanul Muslimin, misalnya mengizinkan Ikhwanul Muslimin mengikuti pemilihan umum meskipun hanya berkoalisi dengan salah satu partai politik. Meskipun diberi kebebasan, Mubarak tetap membatasi gerak-gerik para anggota Ikhwanul Muslimin serta menangkap kemudian menghukum anggota yang dianggap mengancam kekuasaan Mubarak.

### 3.2.2 Kristen Koptik

Agama Kristen menjadi agama minoritas. Agama Kristen yang berkembang di Mesir adalah Kristen Koptik. Pemeluknya sekitar 10%. Dengan jumlah pemeluk Islam sebagai agama mayoritas dan syari'at Islam yang diterapkan di Mesir, terdapat beberapa hal yang tidak sama penerapannya antara Kristen. Dalam hal administrasi, khususnya KTP Mesir, bagi pemeluk Islam akan sangat mudah dan cepat, namun bagi pemeluk agama lain seperti Kristen Koptik akan sangat lama dan berbelit-belit.

Dalam pemerintahan Mubarak, pemeluk Kristen Koptik mengalami banyak diskriminasi. Kelompok Islamis ekstrim tidak jarang menyerang pemeluk

<sup>102</sup> John L. Esposito, Jilid 4, (2001), *Loc cit.*, hlm. 55.

<sup>103</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 224.

Kristen Koptik dengan cara membakar gereja, intimidasi, meneror dan lain-lain. Pemerintah memang menindak hal tersebut, namun tidak cepat dalam penanganannya. Bahkan terkadang hal tersebut tidak akan ditindak. Penganut Kristen Koptik juga tidak diberikan banyak kursi dalam pemerintahan. Mereka juga dibatasi ketika mendaftar akademi kepolisian, akademi militer, guru, dosen, dan juga profesor. Secara konstitusi, Kristen Koptik memang diakui sebagai agama yang sah, namun dalam pelaksanaannya Kristen Koptik mengalami berbagai diskriminasi.

Ketika Mubarak memerintah, dia sempat mengubah konstitusi dengan melarang mendirikan sebuah partai yang berlandaskan agama, termasuk Islam. Hal ini dilakukannya demi mencegah hal yang pernah terjadi dimasa-masa awal modern Mesir karena pada saat itu kekuatan Islam sangat mendominasi. Selain itu, dia juga tidak ingin ada pihak Islam radikal Mesir masuk ke dalam pemerintahan Mesir. Pada masa pemerintahan Mubarak, pemeluk agama Kristen diizinkan untuk menjadi anggota penuh komunitas sosial dan politik yang ada di Mesir.<sup>104</sup>

Pada awal masa pemerintahan Mubarak, pengaruh Islam di Mesir sangat kuat. Kelompok-kelompok Islam ingin menguasai Mesir. Terlalu sibuk mengurus kelompok-kelompok Islami, Mubarak tidak memperhatikan penganut agama selain Islam.

### 3.3 Kebijakan Ekonomi

Ketika resmi dilantik sebagai seorang Presiden, Mubarak mengubah sistem ekonomi Mesir yang awalnya terpusat menjadi terbuka (*open door policy*). Kebijakan ini berimplikasi pada bertambah banyaknya investasi dari sektor swasta. Dia juga mulai mengizinkan investasi asing memasuki perekonomian Mesir. Hal tersebut terbukti pada 1983 total investasi asing menembus angka LE (*Egyptian Pound*) 1,025 juta dan pada 1990 mampu mencapai LE 10,700 juta, 64% berasal dari Mesir, 19% dari Arab, dan 17% berasal dari sumber lain.

Perekonomian Mesir tergantung pada sektor sumber daya alam yang dimiliki. Kekayaan alam Mesir meliputi, minyak bumi, hasil pertanian, dan

---

<sup>104</sup> John L. Esposito, Jilid 4, (2001), *Loc cit.*, hlm. 57.

pariwisata.<sup>105</sup> Selain itu, terdapat lebih dari tiga juta warganegara Mesir yang bekerja di luar negeri, terutama di Saudi Arabia, Teluk Persia, dan Eropa, namun pendapatan utama Mesir berasal dari sektor pariwisata dan lalu lintas Terusan Suez.

Pemasukan utama Mesir berasal dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Mesir memiliki berbagai objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, misalnya Piramida, Spinx, museum Tahrir, Luxor, atau Uksur, Mephis, dan Istana Karnak. Pemasukan keuangan Mesir dari sektor pariwisata sempat mengalami penurunan pada 1992 karena saat itu terjadi perselisihan sebuah kelompok Islam radikal.

Penerimaan pajak dari barang belanjaan yang dibeli oleh turis asing jumlahnya lebih dari 3,6 milyar. Pada 1987, pendapatan Mesir dari sektor pariwisata hanya US \$ 0,3 miliar, kemudian pada tahun 1993 meningkat menjadi US \$ 1,9 miliar. Seiring berjalannya waktu, pendapatan dari sektor pariwisata terus meningkat. Pariwisata Mesir kembali bergairah pada 1995. Pada 1996-1997 tercatat sebanyak 4.000.000 wisatawan mengunjungi Mesir dan mendapat pemasukan senilai US \$ 3,7 miliar. Kemudian pariwisata Mesir kembali mengalami penurunan pada 1997 karena sebanyak 58 wisatawan terbunuh di lokasi wisata Luxor, namun pada 1999, sektor wisata kembali bergairah dan menghasilkan pemasukan senilai US \$ 4 juta miliar. Jumlah yang bahkan lebih banyak dari sebelum terjadinya tewasnya wisatawan tersebut. sampais 2000, Mesir terus mengalami kenaikan pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan data yang dimiliki EIU *Country Profile*, pendapatan Mesir yang berasal dari pariwisata mengalami kenaikan sebanyak 33% dan menghasilkan US \$ 4,3 miliar. Pada 2000, pariwisata Mesir menyumbangkan lebih dari US \$ 4,3 miliar. Meski mengalami penurunan pada 2003, menjadi US \$ 1,8 miliar, ini merupakan angka yang sangat fantastis. Tidak heran jika sektor pariwisata menjadi lahan pemasukan Mesir paling besar yang diikuti oleh hasil pertanian dan minyak.

Pada masa pemerintahan Mubarak, hotel-hotel internasional yang amat megah mulai bermunculan di Mesir, antara lain Sheraton, Four Seasons, Marriott, dan Hilton. Selain itu, pegoperasian kapal pesiar di beberapa sungai di Mesir,

---

<sup>105</sup> Riza Sihbudi dkk, *Op cit.*, hlm. 144.

seperti Sungai Aswan dan Luxor, juga cukup mencengangkan untuk rakyat Mesir. Puluhan kapal pesiar yang berada di Mesir tersebut adalah milik perusahaan asing.

Mesir merupakan salah satu negara penghasil minyak di dunia. Sumber daya alam tersebut baru ditemukan pada pertengahan 1970-an. Kemudian pada saat Mubarak menjadi Presiden, dia mulai mengeksport minyak ke berbagai negara di dunia dan kini Mesir menjadi salah satu negara produsen minyak penting di dunia. Mubarak juga mampu memproduksi minyak untuk kebutuhan dalam negerinya sehingga harga bahan bakar minyak di Mesir relatif murah, yaitu 1 dolar Amerika untuk empat liter bensin. Cadangan minyak yang dimiliki oleh Mesir diperkirakan sebanyak 2,045 triliun barel.<sup>106</sup> Minyak akhirnya juga mampu memberi pemasukan yang cukup besar kepada Mesir. Selain minyak, hasil bumi Mesir yang juga memberi pemasukan kepada Mesir adalah gas, bahkan pemerintah Mubarak menjamin pasokan gas dari Mesir kepada Israel.<sup>107</sup>

Salah satu pendapatan Mesir juga berasal dari Terusan Suez. Kapal-kapal pengangkut minyak yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah terdahulu transit di Terusan Suez untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Eropa. Terdapat 2.700 kapal pengangkut minyak setiap tahunnya melewati Terusan Suez yang memiliki panjang 163 kilometer. Tiap kapal minyak membawa tiga juta barel minyak per hari.<sup>108</sup>

Pada masa pemerintahan Mubarak, Mesir mendapat investasi dan bantuan dari luar negeri, bahkan Mesir juga merupakan negara ketiga sebagai penerima bantuan terbesar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pun telah menanam investasi yang tidak sedikit di Mesir. Amerika Serikat telah memberi bantuan ekonomi dan militer lebih dari US \$ 2 miliar per tahun. Dimulai pada anggaran keuangan 1984/1985 tercatat 2.200 juta dolar Amerika Serikat bantuan diberikan oleh Amerika Serikat. Bantuan tersebut meningkat pada anggaran 1985/1986 menjadi 2.340 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan pada 1989-1996, presentase penerimaan keuangan Mesir yang berasal dari bantuan asing mencapai lebih dari 75%. Amerika Serikat semakin gencar memberikan bantuan kepada Mesir hingga 500% dari total bantuan luar negeri kepada Mesir. Selain itu, pada awal

---

<sup>106</sup> Sukanta. *Konflik Tidak Berujung*. Jakarta: Teraju, 2007, hlm. 34.

<sup>107</sup> Qaris Tajudin dan Akbar Pribadi Brahmana Aji, *Loc cit.*, hlm. 103.

<sup>108</sup> Nieke Indrietta. "Spekulasi Emas Hitam Suez." *Tempo* 13 Feb. 2011, hlm. 92.

pemerintahan Clinton, dia membuat tiga tim untuk menangani pertumbuhan dan pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan sektor swasta. Kerja sama ini sebenarnya menunjukkan bahwa privatisasi dan kapitalisme liberal akan mampu menyembuhkan penyakit politik dan sosial ekonomi di Mesir.<sup>109</sup>

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan IMF<sup>110</sup> tentu saja dengan harapan agar perekonomian Mesir membaik. Mereka juga memberikan bantuan tersebut jika Mubarak menjalankan persyaratan yang mereka berikan, di antaranya pengurangan subsidi bahan makanan. Kemudian pada pertengahan Mei 1987, IMF mengabulkan permohonan bantuan oleh Mesir yang akan melakukan Program Reformasi Ekonomi. Pada akhir 1987, Mubarak menandatangani perjanjian persetujuan untuk penjadwalan kembali bahwa Mesir akan mengembalikan bantuan yang diberikan oleh negara-negara kreditor anggota *Paris Club* di bawah naungan IMF dalam jangka waktu 10 tahun sebesar 12.000 juta dolar Amerika Serikat. Dampaknya adalah kenaikan harga bahan makanan dan bahan bakar yang mencapai 60-80%. Kemudian muncullah berbagai kerusuhan di Mesir yang menolak kebijakan Mubarak tersebut. Akhirnya, Mubarak meninjau ulang kebijakannya tersebut. Dia kemudian menaikkan suku bunga secara bertahap dan dibantu dengan bantuan keuangan untuk neraca pembayarannya. Mesir dan IMF terus melakukan kerja sama. Mubarak memberlakukan paket reformasi ekonomi yang diberi nama *1.000 Day Plan* bulan Desember 1990. Reformasi ekonomi tersebut berdampak lebih positif dan lebih radikal. Sementara itu, anggota-anggota *Paris Club* sepakat untuk menghapus hutang-hutang Mesir sebanyak US \$ 10 miliar.

Reformasi ekonomi Mesir yang telah dicanangkan rupanya harus tertunda akibat berkobarnya Perang Teluk. Perang Teluk yang terjadi saat itu adalah perang yang terjadi antara Irak dan Kuwait pada 1990. Perang Teluk juga sebelumnya pernah terjadi antara Irak dan Iran pada 1975. Pada 1990, Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya, namun nilai petro

---

<sup>109</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.* hlm. 228.

<sup>110</sup> IMF merupakan singkatan dari *International Monetary Fund* yang beranggotakan 181 negara dan didirikan pada Juli 1944. IMF bertugas untuk menggalang kehadiran suatu sistem moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar, membantu neraca pembayaran, dan juga memberikan jasa konsultasi dan kolaborasi akan persoalan moneter. Sumber: "IMF, Siapakah Dia? *Tempo* 18 Oktober 1997. 24 Mei 2012 <<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/33/utama9.htm>>.

dolar menurun akibat kelebihan stok minyak yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut membuat Saddam Husein marah dan meletuslah Perang Teluk.<sup>111</sup> Dampak dari perang tersebut adalah kembalinya 400-600 pekerja asal Mesir yang bekerja di Irak dan Kuwait yang menyebabkan berkurangnya devisa negara. Akibatnya, pekerja tersebut menambah angka pengangguran hingga 20%. Selain itu, Perang Teluk juga berdampak pada berkurangnya wisatawan yang mengunjungi kawasan pariwisata di Mesir. Di sisi lain, Mesir ternyata menerima bantuan dana dari luar negeri, antara lain *The Gulf Financial Coordinating Coordinating Group* (GFCCG), Kuwait, Jepang, dan Saudi Arabia. Untuk Saudi Arabia sendiri, ini adalah bantuan pertama yang diberikan kepada Mesir setelah sebelumnya sempat memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1988. Selain itu, Mesir juga mendapat bantuan berupa penghapusan hutangnya senilai 4.000 juta dolar Amerika Serikat.

Meskipun reformasi ekonomi sempat terganggu dengan terjadinya Perang Teluk antar Irak dengan Kuwait, hasilnya cukup signifikan. Pada tahun 1991, liberalisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemudian inflasi turun hingga di bawah 10%, angka defisit juga berkurang, cadangan devisa mencapai US \$ 18 miliar, dan neraca berjalan mengalami surplus. Meskipun Mesir mendapat banyak bantuan dari pihak asing, Mubarak menegaskan bahwa tetaplah harus mereformasi ekonomi sesuai dengan jati diri Mesir, sehingga harus diimbangi antara pihak internasional dengan pertimbangan dalam negeri. Untuk itu, Mubarak membantu pertumbuhan laju ekonomi Mesir dan juga meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing di kancah internasional. Peningkatan itu dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Mubarak memberikan perhatian lebih dalam bidang sosial, antara lain bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam melakukan reformasi menegaskan bahwa dia tidak akan mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan rakyat.

Hasil dari reformasi ekonomi yang telah berjalan selama tujuh tahun tersebut nampaknya menghasilkan hal-hal positif, antara lain meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi nasional dari 3,6% pada 1991 menjadi 5,1% pada tahun 1998. Angka kemiskinan menurun, 10,9% pada 1991 menjadi 7,4% pada 1998.

---

<sup>111</sup> Akhmad Iqbal. *Perang-Perang Paling Berpengaruh Di Dunia*. (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), hlm. 169-171.

Pendapatan per kapita meningkat dari 660 dolar Amerika Serikat pada 1991 menjadi 1380 pada 1998, dan 118 perusahaan milik negara yang dijual kepada swasta memperoleh keuntungan sebesar 1-8,5% jika dibandingkan dengan sebelumnya, hasil ini jauh lebih baik. Hasil-hasil tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 203/1991 yang diterbitkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mesir yang mencatat bahwa proses swastanisasi telah berjalan lancar dan menghasilkan dampak yang positif. Pada 1995, hutang luar negeri Mesir berkurang dari US \$ 50 miliar menjadi sekitar US \$ 34 miliar. Reformasi perdagangan yang dilakukan mampu mengatasi hambatan-hambatan impor. Tingkat bunga juga bebas ditentukan oleh pihak bank dan tetap di atas angka inflasi selama tahun terakhir (antara 1995-1999). Cadangan devisa memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu US \$ 16 miliar. Inflasi juga berhasil dipangkas dari di atas 20% pada 1989 menjadi 8,4% pada 1995. Defisit anggaran juga turun drastis dari 18% menjadi di bawah 3% dari GDP.<sup>112</sup>

Hasil-hasil yang telah dicapai tersebut ternyata menyisakan dampak negatif juga. Dampak negatif tersebut adalah pengangguran. Sebelum Perang Teluk pada 1990 terjadi, Mesir sudah memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi ditambah lagi dengan pekerja Mesir yang kembali ke Mesir dari Irak dan Kuwait karena perang tersebut. Pada 1993, angka pengangguran di Mesir mencapai 17%, yaitu sebanyak 1,5-2 juta orang. Adapun 80% dari mereka adalah kelompok muda yang merupakan lulusan sekolah teknik dan perguruan tinggi. Melihat kenyataan seperti itu, pemerintah Mesir menyiapkan anggaran sebesar LE 2,2 miliar. Akibat dari sangat banyaknya jumlah pengangguran tersebut adalah kemiskinan. Bagaimana tidak, karena mereka tidak memiliki pekerjaan, otomatis mereka tidak bisa membeli bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Hal ini diperparah dengan sempatnya pemerintahan Mubarak menaikkan harga barang-barang dan mengurai subsidi. Mesir juga sempat menjadi satu dari empat negara yang termasuk dalam *United Nations Development Program's annual Human Development Report*. Melihat hal tersebut, Mesir lagi-lagi mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar US \$ 600 juta untuk menciptakan lapangan kerja melalui

---

<sup>112</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 246-247.

proyek-proyek mendesak untuk kepentingan umum serta pemberian pinjaman kegiatan ekonomi bagi lulusan perguruan tinggi.

Pada 2004, Hosni Mubarak kembali ingin melakukan reformasi ekonomi secara agresif guna menarik investasi asing dan memfasilitasi pertumbuhan GDP, namun hal ini sempat tertunda karena ekonomi global yang sedang memburuk. Pada 2010, para analis menilai pemerintahan Mubarak harus segera melakukan reformasi ekonomi karena kondisi ekonomi masyarakat Mesir rata-rata masih tetap miskin. Reformasi ekonomi tersebut perlu dilakukan untuk menarik investor asing, meningkatkan pertumbuhan, dan memperbaiki kondisi ekonomi bagi penduduk Mesir, namun sebelum Mubarak berhasil mewujudkannya, dia sudah diminta turun dari jabatannya oleh rakyatnya sendiri.<sup>113</sup>

Tercatat populasi rakyat Mesir pada 1966 adalah 30.083.419 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 79.000.000 jiwa pada tahun 2008. Pesatnya pertambahan jumlah penduduk ternyata mampu melemahkan perekonomian Mesir. Tidak hanya itu, keterbatasan lahan pertanian serta ketergantungan terhadap Sungai Nil juga menyebabkan semakin lemahnya perekonomian Mesir. Pada 2005, tercatat pendapatan per kapita Mesir adalah 4.072 dolar Amerika Serikat.<sup>114</sup> Sekitar 40% penduduk Mesir memiliki penghasilan per kapita sebesar US \$ 2 per hari.<sup>115</sup> Berdasarkan data yang dimiliki Bank Sentral, pada tahun 2010 cadangan mata uang Mesir sekitar 36.000.000 Dolar Amerika Serikat.<sup>116</sup> Sedangkan dalam catatan Bank Dunia, PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Mesir sebesar 2.070 dolar Amerika Serikat setiap keluarga.<sup>117</sup>

Masalah dasar yang dialami Mesir adalah banyaknya kelompok muda yang tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Hal ini disebabkan minimnya jumlah tenaga kerja yang diserap, sedangkan kelompok muda yang berada di Mesir sangat banyak.

---

<sup>113</sup> Apriadi Tamburaka (2011), *Op cit.*, hlm. 69.

<sup>114</sup> Sukanta (2007), *Op cit.*, hlm. 34.

<sup>115</sup> Apriadi Tamburaka (2011). *Op cit.*, hlm. 70.

<sup>116</sup> Respati, Yogie. "Krisis Keuangan Ancam Mesir." *Republika* 6 Feb. 2011, hlm. 1.

<sup>117</sup> Yeyen Rostiyani. "Kekayaan Rahasia Sang Firaun Modern" *Republika* 4 Feb. 2011, hlm. 8.

## **BAB IV**

### **KERUNTUHAN REZIM HOSNI MUBARAK**

Hosni Mubarak tidak lagi menjadi Presiden Mesir. Kekuasaannya berakhir pada 11 Februari 2011 melalui demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Mesir. Akhirnya, Mubarak menyerah dan memilih untuk mengundurkan diri. Sebelumnya, Mubarak masih bertahan dan tidak ingin melepaskan jabatannya. Tentu terdapat faktor-faktor penyebab mengapa rakyat Mesir marah dan rela demonstrasi berhari-hari untuk meminta Mubarak melepaskan jabatannya. Sebelum itu, dijelaskan terlebih dahulu Revolusi Mesir 2011 sebagai pengantar kemudian memaparkan faktor penyebab keruntuhan Hosni Mubarak dari berbagai faktor.

#### **4.1 Revolusi Mesir 2011**

Dalam setiap akhir sebuah kekuasaan, pasti terdapat proses dan faktor-faktor penyebab berakhirnya kekuasaan tersebut. Hal tersebut juga terjadi dalam akhir kekuasaan Hosni Mubarak di Mesir. Sebelum membahas kronologi berakhirnya kekuasaan Mubarak, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai proses revolusi yang mengawali proses tersebut.

##### **4.1.1 Awal Munculnya Revolusi**

Hosni Mubarak lengser dari jabatannya dengan cara mengundurkan diri akibat desakan rakyatnya dengan cara demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan terdapat berbagai pemicu. Diawali dengan seorang pengacara bernama Farouk Mohammed Hassan. Dia menentang kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga-harga barang pokok. Akhirnya pada 18 Januari 2011, dia menyusul jejak seorang warga Mesir yang juga menolak kebijakan pemerintah tersebut dengan cara menuangkan bensin ke sekujur tubuhnya kemudian membakar dirinya. Pada 21 Januari 2011, tiga warga Mesir juga melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama. Semakin hari semakin banyak saja warga Mesir yang melakukan hal tersebut.<sup>118</sup> Pembakaran

---

<sup>118</sup> “Inspirasi dari Tunisia.” *Tempo* 6 Feb. 2011, hlm. 103.

diri tersebut membuka mata rakyat Mesir agar juga melakukan sesuatu agar penderitaan mereka segera berakhir.

Pemicu selanjutnya diawali dengan kejadian pada 6 Juni 2011, seorang *blogger* bernama Khalid meninggal akibat disiksa oleh polisi. Dia diperlakukan seperti itu karena dia ketahuan mengunduh video polisi Mesir yang sedang bagi-bagi mariyuana yang didapat dari hasil penyitaan di lapangan. Melihat hal tersebut, seorang Wael Ghanim<sup>119</sup> berinisiatif untuk membuat sebuah grup di *facebook* yang diberi nama “*We Are All Khalid Said*”. Ghanim juga mengelola beberapa grup lainnya di *facebook*. Dengan adanya grup-grup tersebut, Ghanim memobilisasi warga Mesir, terutama anak muda, untuk mulai berkumpul di suatu tempat untuk kemudian bersama-sama berdemonstrasi yang dimulai sejak 25 Januari 2011. Ghanim sempat dinyatakan hilang pada 27 Januari 2011 karena gelombang demonstrasi yang semakin luar biasa. Ternyata dia ditangkap oleh polisi Mesir dan mendekam di penjara selama 12 hari. Berkat lobi dan desakan dari berbagai pihak, termasuk Amnesty Internasional, mampu membuat Ghanim bebas dari penjara. Setelah bebas, dia kembali ke Dubai bukan untuk sekadar pulang, namun kembali ikut berjuang lewat jejaring sosial lainnya, yaitu *Twitter*. Hal ini disebabkan pemerintah Mesir telah memblokir jaringan internet di Mesir. Dia menulis “Kebebasan adalah sebuah berkah dan kita pantas untuk memperjuangkannya”.<sup>120</sup>

Pemicu yang berasal dari jejaring tidak hanya lewat *Facebook*, namun juga melalui *Twitter*. Para pengguna jejaring sosial ini sebagian besar adalah pemuda. Seorang pemuda bernama Ahmed mengaku bahwa dia dan teman-temannya membuat gerakan anti Mubarak di *Twitter* dan tidak menyangka ternyata mendapat respon yang baik. Semakin lama semakin banyak yang membicarakannya. Akhirnya mereka setuju akan membuat demonstrasi pertama pada 25 Januari 2011. Tidak ada rapat secara tatap muka dalam menentukan gerakan tersebut.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Wael Ghanim adalah seorang manajer marketing Google Inc. untuk kawasan Timur Tengah. Dia juga merupakan pendukung tokoh oposisi Mesir, Mohammad El Baradai. Sumber: Apriadi Tamburaka (2011), *Op cit.*, hlm. 114.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>121</sup> Qaris Tajudin and Akbar Pribadi Brahmana Aji (2011), *Loc cit.*, hlm. 99-100.

Selain *facebook* dan *twitter*, situs jejaring sosial lain yang memicu adanya demonstrasi ini adalah *youtube*. Seorang wanita pemberani bernama Ashmaa Mahfouz mengunggah sebuah video di *youtube*. Dalam video itu dia memaparkan tentang empat rakyat Mesir yang membakar diri sebagai bentuk dari protes terhadap kelaparan, kemiskinan, keterpurukan, dan penghinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Setelah dia mengunggah video tersebut, Ashma langsung menuju Tahrir Square. Dia berdiri di lapangan tersebut sambil memegang kertas yang berisi seruan untuk bersama-sama berunjuk rasa untuk menuntut keadilan, kebebasan, kehormatan, dan kemuliaan sebagai manusia. Bahkan dia juga menuliskan nomor *handphone* nya di poster tersebut. Sayangnya hanya ada tiga orang pemuda yang bergabung bersamanya. Setelah itu berakhir karena mereka ditangkap oleh polisi. Kemudian dia merekam kembali video untuk berunjuk rasa pada 25 Januari 2011.<sup>122</sup>

Ashma Mahfouz, Ahmad, dan pemuda Mesir lainnya tidak akan memilih 25 Januari 2011 tanpa ada alasan yang kuat. Pemicu lainnya yang sangat mempengaruhi penentuan tanggal turun ke jalan sekaligus inspirasi mereka adalah peristiwa revolusi di Tunisia. Penentuan tanggal adalah sebuah awal yang penting karena jika terlalu cepat mahasiswa tidak akan banyak yang turun karena saat itu sedang berlangsung ujian. Jika terlalu lama maka momen revolusi Tunisia akan hilang dan hasilnya akan kurang maksimal. Revolusi Tunisia diawali dengan menggelar demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Tunisia. Mereka menuntut presidennya, Zine Al-Abidine Ben Ali, turun dari jabatannya. Demonstrasi yang dilakukan rakyat Tunisia tidak sia-sia. Pada 14 Januari 2011, Presiden akhirnya turun dari jabatannya. Hal inilah yang menyebabkan pemuda Mesir terinspirasi untuk mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Mereka juga melihat bahwa jika mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi bersama-sama dengan jumlah demonstran yang sangat banyak, mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menggulingkan Mubarak dari jabatannya sebagai seorang presiden yang sudah sangat terlalu lama menjabat.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Apriadi Tamburaka (2011), *Op cit.*, hlm. 118-120.

<sup>123</sup> "Mubarak Didesak Turun." *Kompas* 27 Jan. 2011, hlm 8.

#### 4.1.2 Kronologi Demonstrasi dan Pengunduran Diri Hosni Mubarak

Pada Selasa 25 Januari 2011, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di *Twitter*, ribuan orang mulai berkumpul di Lapangan Tahrir untuk berunjuk rasa. Tidak hanya di Kairo, namun juga di kota-kota besar lainnya seperti Ismailia, Alexandria, Mansoura, Tanta, dan Suez. Bahkan beberapa jam kemudian sebagian demonstran pergi menuju kantor NDP. Tercatat 20.000-30.000 demonstran mulai memadati Tahrir Square di Kairo. Mereka semua menginginkan agar Mubarak turun dari jabatannya. Tuntutan pemuda yang merupakan sebagian besar dari demonstran adalah demokrasi, pemilihan umum yang bersih, kemerdekaan, dan pergantian pemerintah.<sup>124</sup> Para demonstran meneriakkan kata-kata “Turun, Hosni Mubarak Turun!”. Polisi langsung diturunkan untuk mengamankan Mesir dari demonstran yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Polisi menghalau demonstran dengan tongkat, tembakan gas air mata, dan meriam air. Sementara demonstran membalasnya dengan melempari batu. Tanggapan Mubarak saat itu adalah langsung menutup akses *Twitter* pada Selasa. Sayangnya, massa sudah bergerak dan berbondong-bondong turun ke jalan untuk memintanya mundur dari jabatannya.<sup>125</sup> Setelah didemo besar-besaran selama dua hari, Mubarak belum merasa terusik. Pada Kamis 27 Januari 2011, demonstran semakin brutal. Di Mesir bagian timur, tepatnya Kota Suez, para demonstran membakar pos polisi yang berada di sana. Dilanjutkan pada Rabu malam, 28 Januari 2011, mereka kembali membakar pos polisi dan kantor pemerintah Mesir. Selain itu, mereka juga melemparkan bom molotov ke dalam kantor cabang NDP di Suez.

Melihat demonstrasi dengan jumlah massa yang mencapai puluhan ribu, pemerintah langsung mengambil tindakan. Kementerian Dalam Negeri Mesir mengeluarkan larangan berkumpul dan berunjuk rasa, namun demonstran tidak mengindahkannya dan tetap berunjuk rasa agar presidennya mundur dari jabatannya. Sampai Kamis, polisi telah menahan 1.000 pengunjuk rasa dan 40 di antaranya dituntut melakukan tindakan makar<sup>126</sup> oleh pengadilan Mesir.<sup>127</sup>

<sup>124</sup> El-Sayyid el Badawy Hahhata. “Darah yang Tumpah Tak Sia-Sia” *Tempo* 13 Feb. 2011, hlm. 106.

<sup>125</sup> “Mubarak Didesak Turun.” *Kompas* 27 Jan. 2011, hlm. 8

<sup>126</sup> Makar adalah 1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dng maksud hendak menyerang (membunuh) orang dsb; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yg sah. Sumber: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc cit.*, hlm. 972.

Sesuai dengan ajakan resmi yang tercantum dalam situs resmi Ikhwanul Muslimin, unjuk rasa akan diadakan dengan massa yang lebih banyak lagi seusai sholat Jum'at 29 Januari 2011. Melihat hal tersebut, pemerintah Mesir segera menutup akses internet menjelang waktu solat Jumat. Empat operator utama yang melayani akses internet di Mesir, yaitu Link Mesir, Vodavone/Raya, Etisalat Misr, dan Telecom Mesir, mengaku layanan mereka telah dihentikan oleh pemerintah. Tidak hanya akses internet saja, akses komunikasi seperti telepon, *Blackberry Internet Service*, dan sms juga ditutup oleh pemerintahan Mubarak. Ribuan pasukan anti teror juga diturunkan di Kairo lengkap dengan tank dan kendaraan polisi anti huru hara. Hal ini menunjukkan betapa takutnya Mubarak akan kondisi pemerintahannya yang terancam runtuh. Akhirnya NDP menyatakan bahwa mereka siap untuk melakukan dialog dengan siapapun, baik tokoh oposisi maupun rakyat Mesir.<sup>128</sup>

Hingga Sabtu 29 Januari 2011, terdapat 48 orang tewas dalam demonstrasi tersebut. Dalam orasinya, Mohammed Osama yang merupakan seorang pengacara di Mesir, dia berkata, "Kami datang ke sini untuk menyerukan, 'Kami tidak menginginkan kamu sama sekali, kami ingin kau segera keluar dari negeri ini!'" Para demonstran masih bertahan di Tahrir Square dan beberapa kota besar di Mesir masih tetap dengan tujuannya, yaitu menginginkan Mubarak turun dari jabatannya dengan tuntutan korupsi yang merajalela, kemiskinan, dan pengangguran yang tidak kunjung terselesaikan. Kantor pusat NDP di Kairo juga telah dibakar oleh para demonstran. Pada hari itu juga, Mubarak menggelar pidato kenegaraan yang disiarkan di televisi nasional milik pemerintah. Polisi yang terus menerus menjaga keamanan demonstrasi sejak hari pertama, pada 29 Januari 2011 ditarik mundur dan diganti oleh militer, namun lapangan Tahrir masih tetap dapat dikuasai oleh para pemuda.<sup>129</sup>

Menindaklanjuti demonstrasi besar-besaran yang telah berlangsung selama empat hari, dia mengatakan akan membubarkan kabinet lama dan membentuk pemerintahan baru, namun dia tetap akan menjadi presiden Mesir.<sup>130</sup> Mubarak

<sup>127</sup> "Kantor Pemerintah Dibakar." *Kompas* 28 Jan. 2011, hlm. 8.

<sup>128</sup> "Mubarak Terancam." *Kompas* 29 Jan. 2011, hlm. 8.

<sup>129</sup> Rahman, Musthafa Abd. "Militer Tentukan Masa Depan Mesir." *Kompas* 30 Jan. 2011, hlm. 11.

<sup>130</sup> "Kairo Porak Poranda." *Kompas* 30 Jan. 2011, hlm. 10.

mengangkat Kepala Intelejen Mesir, Oman Sulaeman, sebagai Wakil Presiden Mesir. Ini merupakan sebuah hal yang berbeda karena selama memerintah sejak 1981, kursi Wakil Presiden Mesir tidak berpenghuni. Mubarak juga menunjuk Menteri Penerbangan Sipil, Ahmed Shafiq, sebagai Perdana Menteri Mesir yang baru.<sup>131</sup> Selain itu, Mubarak juga mulai memberlakukan jam malam dari pukul 16.00 hingga pukul 07.00 pagi.

Keadaan Kairo dan kota-kota besar lainnya sampai 30 Januari 2011 tidak kunjung membaik. Di jalan-jalan nampak banyak tentara yang berjaga-jaga dilengkapi dengan tank berlapis baja. Meskipun begitu, militer tetap membiarkan pengunjuk rasa tetap berdemonstrasi. Para tentara tidak menembaki para demonstran meskipun telah ditetapkan jam malam. Pada tanggal tersebut, Mohamded El-Baradei<sup>132</sup> juga ikut turun ke jalan dan berdemonstrasi bersama rakyat Mesir untuk menuntut Mubarak segera turun dari jabatannya. Aksi massa semakin brutal. Geng-geng pria bersenjata nampak berlari menuju penjara kemudian membebaskan ratusan militan dan ribuan narapidana lainnya. Keadaan saat itu juga dimanfaatkan oleh rakyat untuk menjarah barang-barang yang ada di toko-toko. Kemudian negara-negara di dunia juga mulai memulangkan warga negaranya yang masih berada di Mesir. Turki mengirimkan pesawatnya untuk memulangkan warga negaranya sebanyak 750 orang.<sup>133</sup>

Pada 2 Februari 2011, rombongan pendukung Mubarak memenuhi jalan-jalan di Kairo. Mereka meneriakkan kata "*Na'am li Mubarak!*". Menurut Mohamad Anter, editor Koran *El-Shorouk*, para demonstran pro Mubarak adalah orang bayaran. Walaupun tidak dibayar langsung, mereka dijanjikan dengan pekerjaan atau bantuan lainnya. CNN juga melaporkan bahwa demonstran pro Mubarak mengaku dibayar. Selain itu, mereka memiliki perlengkapan dan identitas yang hanya digunakan oleh polisi, seperti pentungan, pistol, dan kartu identitas anggota. Hal tersebut diketahui ketika terdapat beberapa demonstran pro

---

<sup>131</sup> "Mesir Tidak Menentu." *Kompas* 31 Jan. 2011lm. 10.

<sup>132</sup> Mohammed ElBaradei adalah seorang warganegara Mesir yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2005. Dia merupakan mantan ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selama tiga kali berturut-turut. Dia lebih banyak berkiprah di luar Mesir. Pada 1980, ElBaradei bergabung dengan Institute for Training and Research di PBB sebagai penanggung jawab program hukum internasional. Setelah pension dari IAEA, dia memilih untuk tinggal di Wina, Austria. Sumber: Abdullah Sammy (2011), *Loc cit.*, hlm. 8.

<sup>133</sup> "Mesir Tidak Menentu." *Kompas* 31 Jan. 2011lm. 10.

Mubarak yang disandera oleh demonstran anti Mubarak. Menteri Dalam negeri mengatakan bahwa kartu yang dimiliki demonstran pro Mubarak merupakan hasil curian. Bentrokan juga sempat terjadi antara demonstran anti Mubarak dengan demonstran pro Mubarak.<sup>134</sup>

Pada 6 Februari 2011, Ikhwanul Muslimin selaku oposisi yang cukup kuat di Mesir, membuka jalan untuk berlangsungnya negosiasi antara pemerintah yang diwakili oleh Omar Sulaeman dan pihak oposisi. Tim oposisi diwakili oleh enam kelompok, termasuk Ikhwanul Muslimin.<sup>135</sup> Dalam negosiasi tersebut, Sulaeman meminta oposisi agar tetap mengakui Hosni Mubarak sebagai seorang presiden hingga pemilu yang diselenggarakan pada September mendatang (September 2011). Pihak oposisi tentu menolak permintaan pihak pemerintah. Pihak oposisi sepakat untuk membuat sebuah komite bersama di bidang hukum, sedangkan para politikus handal akan memberikan rekomendasi pada amandemen konstitusional. Ikhwanul Muslimin sempat menyetujui untuk mengakui legitimasi bahwa Sulaeman adalah wakil pemerintahan. Hal tersebut sempat membuat perbedaan persepsi di pihak oposisi lainnya. Negosiasi tersebut tidak menghasilkan apapun karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pihak pemuda juga menegaskan bahwa mereka tidak mengakui apapun hasil dari negosiasi tersebut. Khaled Abdul Hamid selaku perwakilan dari pihak pemuda menyatakan bahwa mereka tidak mau mengakui jajaran kabinet pemerintahan Mesir saat itu, termasuk Omar Sulaeman, yang mereka mau adalah Mubarak segera turun dari jabatannya. Adapun tuntutan oposisi rakyat Mesir kepada pemerintahan Mesir adalah Presiden Hosni Mubarak segera lengser, Undang-Undang Darurat yang diberlakukan sejak 1981 dicabut, pembubaran parlemen, dan membebaskan seluruh tahanan politik.<sup>136</sup>

Pada 10 Februari 2011 menjadi hari paling menggembirakan bagi rakyat Mesir. Pagi hari, saat demonstran sedang sibuk beraktivitas mengumpulkan dan membuang sampah, ada juga yang sedang membagikan sarapan gratis kepada sesama demonstran, tiba-tiba rombongan militer mendatangi Tahrir Square.

---

<sup>134</sup> Qaris Tajudin and Ninin Damayanti (2011), *Loc cit.*, hlm. 105.

<sup>135</sup> Ini adalah kali pertama Ikhwanul Muslimin berdialog langsung dengan pihak pemerintah Mesir. Abdullah Sammy (2011), *Loc cit.*, hlm. 8.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Sebelumnya, para pemimpin militer berkumpul di Kantor Kementerian Pertahanan kemudian diiringi tank-tank gagah milik militer, rombongan tersebut meluncur menuju Tahrir Square. Sebuah pengumuman kemudian diumumkan oleh Panglima Militer merangkap Menteri Pertahanan, Mohammed Hussein Tantawi. Dia mengatakan bahwa saat ini militer yang mengambil alih kekuasaan Mesir. Hal ini memang sudah dikritisi oleh oposisi pemerintah Mesir yang menilai bahwa UU tersebut telah disalahgunakan oleh pemerintah Mesir. Militer juga akan mengusahakan agar orang-orang jujur yang menyerukan agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh pejabat Mesir dan menginginkan terjadinya reformasi, tidak akan dihukum.<sup>137</sup> Sontak pengumuman tersebut membuat para demonstran senang dan bersorak bergembira. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengumuman tersebut, berarti Mubarak sudah turun dari jabatannya, namun mereka masih menahan diri karena pernyataan tersebut barulah sepihak dari militer. Mereka masih ingin mendengarnya secara resmi dari pihak pemerintah.<sup>138</sup>

Sebuah layar putih raksasa sudah terbentang di depan kantor koordinator demonstran di Tahrir Square yang akan digunakan sebagai layar untuk menyaksikan pidato Hosni Mubarak. Puluhan ribu pasang mata telah siap mendengar pidato resmi Hosni Mubarak dengan harapan dia akan mengundurkan diri saat itu juga. Pukul 20.00 (waktu Mesir), para demonstran sudah siap untuk menanti detik-detik menegangkan tersebut. pukul 20.11, televisi Mesir milik pemerintah masih menayangkan ramalan cuaca dilanjutkan iklan-iklan yang meningkatkan nasionalisme, namun rakyatnya sudah bosan melihatnya karena telah diulang berpuluh-puluh kali dalam sehari. Setelah itu, muncul sosok yang ditunggu-tunggu. Pidato Mubarak diawali dengan bagaimana dia telah benar-benar mengembalikan sepenuhnya Sinai dari tangan Israel dan banyak hal-hal hebat yang dilakukan oleh Mubarak. Dia ingin mengaduk-aduk perasaan rakyatnya, namun setelah sekian lama dia berpidato, tidak ada kata mundur yang dia ucapkan. Mubarak justru tetap akan menjadi Presiden sampai pemilu yang akan diselenggarakan Setember 2011 dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Omar Sulaeman selaku Wakil Presiden Mesir, sama seperti pidato-pidato

---

<sup>137</sup> Abdullah Sammy Esthi Maharani. "Husni Mubarak Mundur." *Republika*, 12 Feb. 2011, hlm. 7.

<sup>138</sup> Qaris Tajudin Padjar Iswara, dan Akbar Pribadi. "Revolusi Mesir" *Tempo* 20 Feb. 2011, hlm. 96.

sebelumnya. Reaksi rakyat tentulah tidak baik. Mereka marah dan mengangkat sepatu mereka tinggi-tinggi pertanda kekecewaan yang sangat mendalam. Akhirnya, mereka pulang ke rumah dan berjanji akan membawa massa yang jumlahnya akan jauh lebih banyak keesokan hari. Tidak hanya rakyat, ternyata tentara juga marah terhadap pidato Mubarak tersebut, namun militer tidak menampakkannya. Mereka menunggu dan siap mengamankan demonstrasi dan reaksi rakyat selanjutnya. Bahkan, militer telah menyatu dengan rakyat.<sup>139</sup>

Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2011, sebagian pengunjung rasa beralih ke depan istana kenegaraan di Heliopolis. Kali ini militer bergabung bersama rakyat. Akan tetapi, militer memang bergerak bersama rakyat, namun tetap menjaga nama baik pemimpinnya, yaitu Hosni Mubarak. Militer juga memastikan bahwa tidak akan ada bentrokan hari itu, baik di Tahrir Square maupun di depan istana negara. Pengunjuk rasa hari itu tidak hanya pemuda dan laki-laki, namun ibu-ibu, anak-anak, dan wanita ikut turun ke jalan sambil meneriakkan kata-kata "*Irhal, Irhal, Irhal!*".

Saat petang waktu setempat, tepatnya pukul 16.04 dihari Jum'at, Wakil Presiden Mesir, Omani Sulaiman, mengabarkan bahwa Hosni Mubarak telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang presiden lewat sebuah stasiun televisi Mesir. Adapun kekuasaan akan dialihkan kepada militer. Menurut konstitusi Mesir, bila presiden mengundurkan diri, ketua parlemen akan menjadi pemimpin sementara. Untuk kali ini militer yang menjadi pemimpin sementara karena militer telah membekukan parlemen Mesir. Sebelumnya, militer tidak pernah membiarkan demonstrasi lebih dari 200 orang di Mesir, namun kali ini militer justru bergabung dan menjaga demonstrasi tersebut dan berjanji untuk tidak menembakkan satu butir peluru pun kepada demonstran.<sup>140</sup> Seluruh rakyat Mesir bergembira dan menangis haru karena akhirnya mereka bisa terlepas dari kesengsaraan yang mereka alami, mulai dari kebebasan yang dikekang, kemiskinan, dan sebagainya. Seluruh demonstran di Tahrir Square, Heliopolis, maupun Alexandria semua merayakannya dengan bertakbir, menari, dan bernyanyi serta dilengkapi dengan kembang api. Rakyat yang masih di dalam rumah juga

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

ikut bergabung berasama mereka.<sup>141</sup> Menurut laporan dari Al-Arabiyya, Hosni Mubarak beserta keluarga telah pergi meninggalkan Kairo ke resor Sharm el-Sheikh di Sinai menggunakan pesawat militer. Keberangkatannya tersebut ditemani oleh Letjen Sami Annan selaku Kepala Staf Pasukan Keamanan Mesir.<sup>142</sup>

Setelah Mubarak berhasil digulingkan, NDP langsung dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan atas permintaan rakyat yang takut jika NDP masih terus ada, maka rezim seperti Mubarak akan terus ada. Tidak hanya NDP, beberapa pejabat pemerintahan Mubarak dicekal. Menurut kantor berita Mesir, *MENA*, Kejaksaan Mesir melarang Ahmed Nazif selaku mantan perdana Mesir dan Habib Al-Adly selaku mantan Menteri Dalam Negeri.<sup>143</sup>

Revolusi telah dicapai, warga Mesir kembali ke rumah masing-masing dengan suasana hati yang sangat gembira sembari berharap Mesir akan menjadi lebih baik dengan pemerintahan yang baru sehingga mereka bisa hidup jauh lebih baik dari kehidupannya saat ini.

#### **4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pengunduran Diri Hosni Mubarak**

Hosni Mubarak mengundurkan diri melalui demonstrasi besar Keinginan untuk melengserkan Hosni Mubarak tentu disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankannya. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Hosni Mubarak ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera dan mewujudkan Mesir menjadi lebih baik. Krisis yang terjadi sejak akhir 1980 ternyata tidak mampu dia tangani dengan baik. Bahkan di awal 1990, Amerika Serikat memberikan solusi kepada Mesir bahwa penyelesaian krisis Mesir tergantung pada kemampuan Kairo untuk menangani secara efektif masalah-masalah sosial ekonomi dan politiknya yang sudah genting. Masalah-masalah yang ada di Mesir, terutama dengan kaum Islam radikal, tidak bisa hanya dipandang dari kerangka politik saja, namun juga dalam konteks tantangan pembangunan yang berkesinambungan, kemudian dengan menyesuaikan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan beberapa solusi lainnya, namun

<sup>141</sup> *Ibid.*,

<sup>142</sup> Abdullah Sammy and Esthi Maharani (2011), *Loc cit.*, hlm. 1.

<sup>143</sup> Nur Hasan Murtiaji. "Mantan Pejabat Mesir Dicekal." *Republika*, 14 Feb. 2011, hlm. 9.

Mubarak tetap tidak mampu menjalankannya sehingga krisis yang dialami Mesir belum dapat terselesaikan.<sup>144</sup> Adapun faktor-faktor penyebab kemarahan rakyat Mesir sehingga membuat Presiden lengser dari jabatannya adalah politik, agama, dan ekonomi.

#### 4.2.1 Faktor Politik

Ketika Hosni Mubarak diangkat menjadi Presiden Mesir, dia menginginkan demokrasi yang sempurna. Oleh sebab itu, dia memulainya dari awal dan sudah mengumumkan juga kepada pemerintahannya dan rakyat Mesir bahwa Mesir akan menjalani proses menuju demokrasi yang sesungguhnya. Pada kenyataannya, Mesir tidak tumbuh menjadi negara yang demokratis.

Salah satu faktor tuntutan masyarakat Mesir adalah demokrasi yang sesungguhnya. Kebebasan adalah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh rakyat Mesir selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menginginkan hak untuk menyuarakan pendapat yang dijamin oleh negara. Hosni Mubarak tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam berekspresi. Ini menjadi faktor yang sangat penting karena demokrasi sangat identik dan memang sangat memberikan ruang bebas kepada siapapun untuk melakukan segala hal yang diinginkan, namun tidak melanggar norma yang ada.

Dimulai dari pembatasan gerak partai oposisi. Kekuasaan Hosni Mubarak yang otoriter dan represif<sup>145</sup> hampir tidak menyisakan ruang aman kepada oposisi untuk mengekspresikan perlawanan politiknya terhadap politik Mubarak. Seperti yang sudah disebutkan dalam subbab kebijakan politik, Mubarak membatasi kontak antara partai oposisi dengan masyarakat. Kemudian Mubarak juga melarang adanya koalisi antar partai politik oposisi. Ini merupakan kebebasan yang merugikan partai politik oposisi yang juga ingin berpartisipasi dalam kancah perpolitikan Mesir. Selanjutnya adalah cara yang dilakukan Mubarak untuk memenangkan pemilu. Salah satu cara yang dilakukan Mubarak adalah dengan mengintimidasi rakyat yang memilih partai oposisi. Rakyat tentulah akan sangat takut karena dia mengetahui bahwa siapa saja yang menentang perintah Mubarak

---

<sup>144</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 228.

<sup>145</sup> Represif adalah bersifat menekan, menahan, atau mengekang. Sumber: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2008), hlm. 1.296.

akan dihukum. Oleh karena itu, NDP tentulah mendapat dukungan penuh oleh masyarakat, sipil, dan militer serta selalu memenangkan pemilu yang diselenggarakan di Mesir. Selain itu, Mubarak juga membatasi organisasi-organisasi hak asasi manusia dan berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang ingin berdiri di Mesir.<sup>146</sup>

Hal lain yang mengikat kebebasan di Mesir adalah kebebasan pers. Pers tidak bisa dengan leluasa menyalurkan aspirasi dari rakyat atau mengkritik pemerintahan karena pemerintahan Mubarak cukup ringan tangan jika ada siapa saja yang dianggap menggoyang rezim Mubarak. Barang siapa yang berani melakukannya, pemerintah tidak akan takut untuk menangkap wartawan, memenjarakan, bahkan melarang hingga menutup pihak penerbit.<sup>147</sup> Oleh karena itu, selama ini mereka lebih memilih untuk bungkam daripada harus mengorbankan profesi dan produksi mereka.

Setelah adanya pengekanan kebebasan, terdapat sebuah kebijakan Mubarak yang menjadi pelengkap kebebasan berekspresi bagi rakyat Mesir. Mubarak menerapkan kebijakan yang despotik, yaitu adanya Undang-Undang *security act* yang berisi bahwa pemerintah dengan bebas dapat menangkap siapa saja tanpa proses hukum.<sup>148</sup> Kebebasan yang dibatasi sudah cukup membuat rakyat Mesir menderita, ditambah lagi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan atau melakukan hal-hal yang dianggap mengancam pemerintahan Mubarak, maka dia akan ditangkap dan dihukum tanpa proses hukum.

Hosni Mubarak dinilai mampu menumpas kelompok Islam radikal dan oposisinya, namun Mubarak melakukannya dengan cara kekerasan, bukan dengan cara lain yang lebih halus. Hal ini mendapat perhatian dan teguran dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia di dunia karena pemerintah Mubarak dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut laporan *Middle East Watch* dan *Amnesty International*. Mubarak melakukan penangkapan orang tanpa ada tuduhan yang jelas atau tanpa peradilan, penyiksaan, pembunuhan saksi dalam proses interogasi, serta tindakan-tindakan berdarah lainnya. Organisasi Hak Asasi Manusia di Mesir juga mengatakan bahwa mereka telah mendokumentasikan

---

<sup>146</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op ci.*, hlm. 224.

<sup>147</sup> Nur Hasan Murtiaji (2011), *Loc cit.*, hlm. 2.

<sup>148</sup> Abdullah Sammy (2011), *Loc cit.*, hlm. 2.

penangkapan terhadap lebih dari tujuh belas ribu orang yang ditangkap karena berkaitan dengan gerakan kekerasan militan serta kelompok oposisi politik yang terjadi pada 1989-1997.<sup>149</sup>

Menjalani hidup dengan pengekan kebebasan seperti itu selama 30 tahun membuat semua itu terakumulasi dan menumpuk. Hal tersebut juga dialami oleh hampir seluruh rakyat Mesir sehingga muncullah rasa senasib sepenanggungan dan membuat mereka ingin memberontak agar bisa hidup dengan kebebasan yang harusnya mereka dapat sebagai dampak dari demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan memilih partai, wakil rakyat, dan presiden yang mereka inginkan, serta kebebasan untuk berekspresi. Salah satu buktinya terdapat dalam majalah *Arabia The Islamic World Review* pada April 1987, dilaporkan bahwa rakyat Mesir tidak puas dengan kemenangan pemilu pada 1987. Mereka ingin terjadi sebuah perubahan radikal dalam politik Mesir dan berakhirnya rezim militer.<sup>150</sup> Masyarakat sudah muak dengan kediktatoran presiden mereka. Muhammad Naguib, Gamal Abdul Nasser, dan Anwar Sadat adalah presiden yang berasal dari kalangan militer. Mereka semua adalah pemimpin Mesir yang diktator. Ketika Anwar Sadat turun tahta karena dibunuh dan pada akhirnya diganti oleh Mubarak. Ketika Mubarak menjadi Presiden, rakyat sebenarnya menginginkan sebuah perubahan yang signifikan. Ternyata sama saja dengan Presiden sebelumnya sehingga rasa marah dengan Presiden yang bertangan besi seperti itu yang menyebabkan kebebasan rakyat yang terkekang menuai kemarahan yang luar biasa.

Mesir memang dinyatakan secara *de jure* sebagai negara dengan sistem republik pada 1952 setelah terjadinya Revolusi Mesir kedua yang menuntut Raja Farouk turun dari tahtanya dan dilanjutkan oleh Muhammad Naguib, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, dan Hosni Mubarak yang memerintah dengan tangan besi.<sup>151</sup> Akumulasi kekecewaan rakyat yang sudah dipimpin oleh pemimpin yang tidak demokratis menjadi salah satu kekuatan besar bagi mereka untuk menurunkan Mubarak agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dan sejahtera.

---

<sup>149</sup> Fawaz A. Gerges (2002), *Op cit.*, hlm. 231-232.

<sup>150</sup> Fathi Usman, *Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi*, diterjemahkan dari *Ikhwan and Democracy* oleh Nasmai Lovita Anas, Jakarta: Media Da'wah, 1988, hlm. 79.

<sup>151</sup> "Dilema Husni Mubarak." *Republika* 5 Feb. 2011, hlm. 2.

Selama menjabat sebagai Presiden, Mubarak mampu membela kepentingan Amerika dalam menjaga poin-poin Perjanjian *Camp David* yang melarang Mesir untuk menyerang Israel dan menjaga kepentingan AS di Timur Tengah. Salah satunya ketika Israel mengepung Gaza pada 2007. Pada saat itu, rakyat Gaza yang kelaparan dan membutuhkan obat-obatan tidak mendapat banyak bantuan. Mesir yang berbatasan langsung dengan Palestina, tidak berbuat apapun. Mubarak tetap memerintahkan untuk menutup pintu perbatasan Mesir-Palestina yang merupakan konspirasi antara AS dan Mesir. Mesir benar-benar tidak memedulikan apa yang terjadi di Gaza. Padahal rakyat Mesir sendiri telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk meminta agar pemerintah Mesir berkenan membuka pintu perbatasan Mesir sehingga rakyat Palestina mendapat bantuan pangan dan obat-obatan.

Sibuk mengurus politik luar negerinya dengan Amerika dan Israel terkait konsekuensi Perjanjian *Camp David*, Mubarak tidak bisa menyejahterakan rakyat Mesir. Hal ini terbukti dengan realita kondisi Mesir dalam 10 tahun terakhir (2001-2011) digelayuti oleh kemiskinan, krisis pangan, dan pengangguran. Angka pengangguran di Mesir mencapai 15%. Beberapa media asing memberitakan bahwa rakyat Mesir sangat menderita kelaparan dan sebagian besar pemuda tidak bisa menikah karena takut tidak bisa membayar sewa apartemen sebagai tempat tinggalnya nanti.<sup>152</sup>

#### **4.1.2 Faktor Agama**

Ketika Mubarak diangkat menjadi Presiden, dia berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan masalah sosial, berusaha untuk menindak korupsi, dan membebaskan ketua agama dan politik yang dipenjara saat pemerintahan Sadat. Kenyataannya, Mubarak menepati janjinya dalam poin yang terakhir, yaitu membebaskan ketua agama dan politik yang dipenjara, namun masalah sosial dan penindakan korupsi tidak kunjung selesai.

Kebebasan yang diminta oleh rakyat tidak hanya dalam bidang politik, namun juga dalam bidang agama. Contohnya, Ikhwanul Muslimin yang sangat ditentang oleh pemerintahan Mubarak. Mereka tidak boleh bergerak dan

---

<sup>152</sup> Agus N. Cahyo (2011), *Op cit.*, hlm. 159-161.

menjalankan program kerjanya secara bebas.<sup>153</sup> Padahal dalam Konstitusi Mesir Artikel 46 dituliskan, bahwa “Negara menjamin kebebasan warganegara untuk memeluk kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya”.

Al-Azhar adalah pusat peradaban Islam di dunia, bahkan mendapat julukan “Ibu atau pusat negeri-negeri Islam”, namun pada kenyataannya kehidupan Mesir kini menjadi lebih sekuler. Misalnya saja di pertokoan Khan Khalili yang terkenal sangat ramai dan terletak di dekat Al-Azhar (lama) serta Masjid Sayyidina Husain, orang-orang tetap asik berbelanja, menonton TV, dan lain sebagainya ketika adzan berkumandang.<sup>154</sup> Padahal sudah jelas letaknya di dekat sebuah masjid, namun mereka tidak menyegerakan diri untuk solat. Kemaksiatan dan praktik kemungkaran mulai merajalela. Tentu hal ini sangat ironi dengan keberadaan Al-Azhar yang dianggap ibu dari negeri-negeri Islam di dunia. Inilah salah satu kekecewaan rakyat karena pemerintah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang kurang sesuai dengan kehidupan Mesir yang sangat Islami. Ditambah lagi peran Al-Azhar yang perannya menurun dalam masalah-masalah sosial seperti ini.

Hosni Mubarak tidak pandang bulu dalam menindak siapa saja yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Dia menangkap kaum Islam militan seperti Al Jamaah wa Jihad sampai yang moderat seperti Ikhwanul Muslimin. Pengekangan kebebasan tak hanya dilakukan kepada Muslim di Mesir saja, tapi dilakukan juga terhadap penganut Kristen Koptik.

Penganut Kristen Koptik kesulitan untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan hak mereka sebagai warga negara Mesir. Mereka sulit untuk mendapat perizinan mendirikan gereja, dipersulit dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), tidak bisa menjabat dalam posisi pemerintahan yang strategis, politik, dunia pendidikan, dan bentuk diskriminasi lainnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan perlakuan akibat sentimen agama yang biasanya berakhir dengan kekerasan seperti penculikan, pemerkosaan, terror, pengucilan, bahkan sampai pembunuhan.

---

<sup>153</sup> Yogie Respati (2011), *Loc cit.*, hlm. 2.

<sup>154</sup> “Dilema Husni Mubarak.” *Republika* 5 Feb. 2011, hlm. 2.

### 4.1.3 Faktor Ekonomi

Ketika Mubarak diangkat menjadi Presiden, dia berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan masalah sosial, berusaha untuk menindak korupsi, dan membebaskan ketua agama dan politik yang dipenjara saat pemerintahan Sadat. Kenyataannya dia dan kroni-kroninya tetap korupsi dan keadaan ekonomi pun tidak kunjung membaik sejak akhir 1980 hingga dia mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut data statistik, 40% dari warga Mesir yang berjumlah 80.000.000 penduduk mengalami kemiskinan. Ini bukanlah jumlah yang sedikit, ditambah lagi pada saat yang sama harga barang kebutuhan pokok meningkat. Kemudian angka pengangguran juga semakin bertambah. Berasal dari keadaan itulah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar rakyat Mesir untuk meminta Mubarak turun dari jabatannya dengan harapan keadaan ekonomi Mesir akan berubah dan membaik sehingga mereka bisa hidup sejahtera.<sup>155</sup>

Peran militer di Mesir berbeda dengan peran militer di negara lain. Militer telah menguasai berbagai macam industri di Mesir. Tentu saja hampir semua personelnnya dipekerjakan di berbagai industri di Mesir. Hal tersebut tentunya memperkecil kesempatan kerja untuk rakyat sipil. Inilah salah satu penyebab mengapa banyaknya pengangguran di Mesir.

Mesir memiliki lahan pertanian yang luas dan subur dan terletak di sepanjang Sungai Nil. Ironisnya, Mesir tetap miskin dan masih berstatus sebagai negara ketiga.<sup>156</sup> Mesir bahkan masih harus mengimpor beberapa hasil pertanian untuk konsumsi dalam negeri. Akibat dari semua itu adalah jumlah pengangguran yang terus meningkat, harga-harga kebutuhan pokok kian tinggi, serta korupsi yang terus merajalela.<sup>157</sup>

Mendapat waktu yang sangat lama untuk menjadi seorang pemimpin Mesir rupanya telah membuat Mubarak lupa akan kewajibannya untuk membuat

<sup>155</sup> Azra, Azyumadi. "Krisis Mesir dan Indonesia" *Republika*, 10 Feb. 2011, hlm. 2.

<sup>156</sup> Negara ketiga atau negara dunia ketiga adalah sebutan atau dirumuskan untuk negara-negara yang pada umumnya lebih miskin dari negara-negara maju. Negara di dunia ketiga kebanyakan berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Rumusan ini memang sifatnya kasar dan banyak kekurangannya. Negara dunia pertama adalah negara maju seperti Amerika. Negara di dunia kedua adalah negara yang menganut sistem sosialisme, seperti Uni Soviet dan Eropa Timur. Negara di dunia ketiga kebanyakan memiliki rezim yang otoriter. Sumber: Arif Budiman (1996), *Op cit.*, hlm. 106.

<sup>157</sup> "Dilema Husni Mubarak." *Republika* 5 Feb. 2011, hlm. 2.

kebijakan agar rakyatnya sejahtera. Dia justru terbuai dengan nikmatnya kekuasaan dan sibuk memperkaya diri, keluarga, serta kroni-kroninya. Harga-harga bahan-bahan pokok melambung tinggi berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.<sup>158</sup> Harga-harga barang yang tinggi, banyaknya pengangguran, korupsi yang merajalela membuat rakyat marah dengan keadaan seperti itu. Rakyat menginginkan agar pemerintah segera mengubah kebijakan ekonominya yang pro rakyat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa sehingga rakyat menjadi lebih sejahtera.<sup>159</sup>

Salah satu penyebab utama turunya Hosni Mubarak adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia memang mampu membuat Mesir untuk terus stabil, namun dia lakukan itu dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika dan Israel. Sementara itu, dia membiarkan KKN terus merajalela. Hal ini tentu menambah tingkat kemiskinan di Mesir karena anggaran yang harusnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat justru diambil oleh Mubarak dan kroni-kroninya. Dimulai dari dirinya sendiri. Mubarak memiliki kekayaan mencapai 20 miliar poundsterling atau lebih dari 287 triliun yang tersebar di beberapa bank yang berada di Swiss, AS, dan Inggris. Selain itu, dia juga memiliki harta berupa bangunan-bangunan mewah di Inggris, Los Angeles, Washington DC, dan New York. Ketika satu sisi rakyatnya sedang bersusah payah mencari sesuap nasi, dia bahkan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk menjamu tamu-tamunya yang berasal dari Eropa dengan jamuan yang super mewah. Contohnya saja ketika Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, berkunjung ke Mesir, Mubarak menjamunya dengan villa mewah di kawasan wisata Sharm el-Sheikh.<sup>160</sup>

Mubarak memiliki kekayaan sebanyak US \$10 miliar. Sebagian besar berasal dari komisi perdagangan senjata dan bisnis *real estate* di daerah Kairo serta kawasan wisata di Hurghada dan Sharm el-Sheikh. Dia juga memiliki asset berupa properti di London, New York, dan juga Sharm el-seikh, dan sebuah jet pribadi. Koran *Alkhabar* juga melaporkan bahwa Mubarak memiliki sebuah rumah mewah di Manhattan. Sedangkan harta milik istrinya, Suzzane, sebanyak US \$ 3-5 miliar. Uang tersebut sebagian besar disimpan di bank yang berada di

<sup>158</sup> Abdullah Sammy (2011), *Loc cit.*, hlm. 2.

<sup>159</sup> Qaris Tajudin and Akbar Pribadi Brahmana Aji (2011), *Loc cit.*, hlm. 102.

<sup>160</sup> Agus N. Cahyo (2011), *Op cit.*, hlm. 160-161.

Amerika Serikat. Dia juga memiliki properti di beberapa kota di dunia, seperti London, Frankfurt, Madrid, Paris, dan Dubai. Menurut laporan rahasia, sang ibu negara tersebut juga telah menjadi anggota klub miliarder sejak tahun 2000.<sup>161</sup>

Anak-anak Mubarak juga memiliki kekayaan dengan jumlah yang fantastis. Anak pertama Mubarak yang bernama Alaa memiliki kekayaan sebesar US \$ 8 miliar. Sama seperti ayah dan ibunya, Alaa Mubarak juga memiliki properti senilai US \$ 2,1 miliar di Los Angeles, Rodeo Drive, Washington dan di pinggiran Manhattan, Amerika Serikat, dan New York serta memiliki dua buah kapal pesiar senilai 60 juta euro. Gamal Mubarak, anak bungsu Hosni Mubarak, ternyata memiliki kekayaan yang tidak kalah banyak dengan ayah, ibu, serta kakaknya, yaitu senilai US \$ 17 miliar. Dia memiliki sebuah rumah yang sangat besar bergaya Georgian berlantai enam di Knightsbridge, London Barat senilai 8,6 juta pounsterling atau Rp 112 miliar. Selain itu, dia juga memiliki sebuah jet pribadi.<sup>162</sup> jadi, jika ditotal semua, kekayaan keluarga Hosni Mubarak mencapai US \$ 40 miliar atau senilai dengan Rp 360 triliun. Bahkan ahli Timur Tengah dari Princeton University di AS, Prof. Amaney Jamal, mengatakan bahwa kekayaan Mubarak mencapai US \$ 70 miliar atau Rp 624 triliun. Sebuah angka yang mencengangkan dan sungguh fantastis. Jika total kekayaan Mubarak US \$ 40-70 miliar, itu artinya keluarga Mubarak menjadi orang terkaya di dunia, karena menurut Majalah Forbes, orang terkaya saat ini adalah Carlos Slim yang memiliki kekayaan sekitar US \$ 54 miliar.<sup>163</sup>

Berdasarkan data tersebut menimbulkan kecurigaan. Bagaimana bisa seorang presiden memiliki kekayaan yang sangat melimpah ruah. Tidak hanya kekayaan milik Mubarak saja, namun kekayaan yang jumlahnya sangat besar juga dimiliki oleh istri dan anak-anaknya. Hal tersebut mengundang kecurigaan bahwa Mubarak telah melakukan tindak korupsi.

---

<sup>161</sup> Apriadi Tamburaka. *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2011, hlm. 127-128.

<sup>162</sup> Qaris Tajudin and Akbar Pribadi Brahmana Aji. "Revolusi Tweeps" *Tempo* 13 Feb. 2011, hlm. 102.

<sup>163</sup> Apriadi Tamburaka (2011), *Op cit.*, hlm. 128-129.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

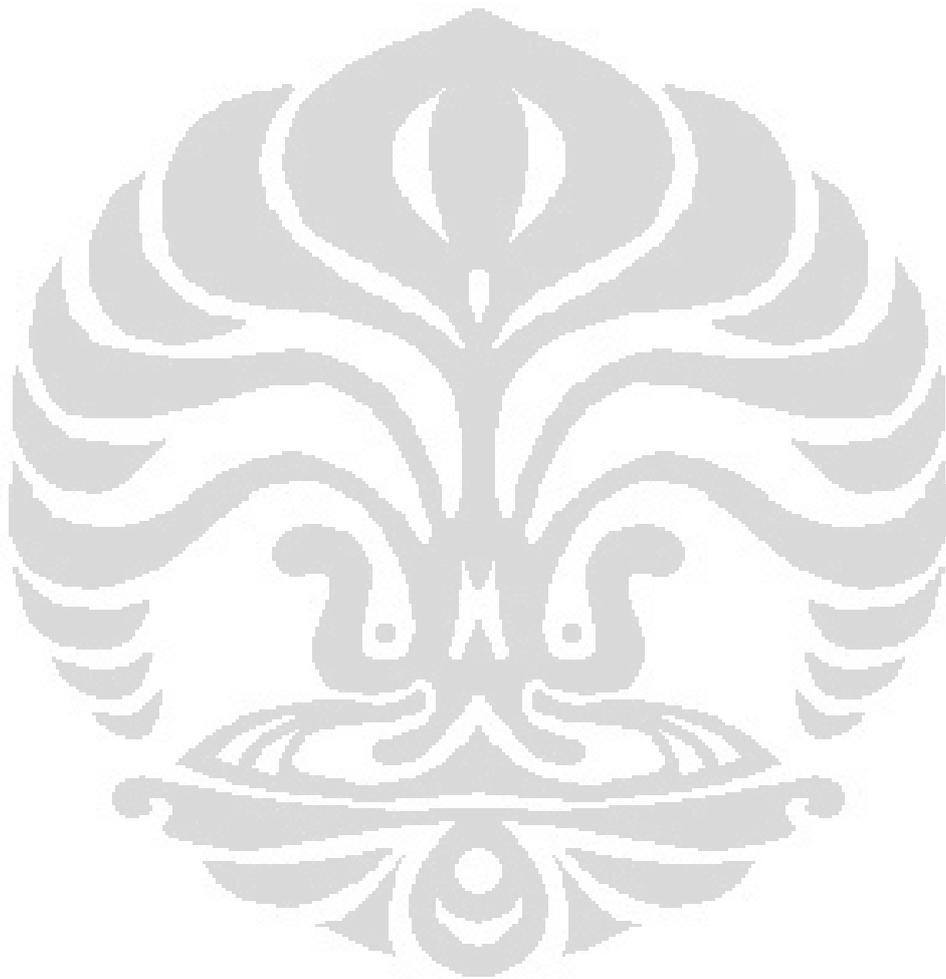
Hosni Mubarak mempertahankan kekuasaannya sebagai Presiden Mesir selama 30 tahun dengan tiga kebijakan, yaitu kebijakan politik, kebijakan dalam bidang agama, dan kebijakan ekonomi. Dalam kebijakan politik, Hosni Mubarak menggunakan militer yang kuat, kebijakan *security act*, dan tidak membuat batas waktu masa jabatan Presiden Mesir. Dalam kebijakan bidang agama, Mubarak menindas kelompok-kelompok Islam, misalnya Al-Jamaah Wa Jihad dan Ikhwanul Muslimin, membuat Al-Azhar menyetujui kebijakan Mubarak, dan mendiskriminasi penganut Kristen Koptik. Dalam bidang ekonomi, Mubarak mempertahankan kekuasaannya dengan menyejahterakan rakyatnya. Cara yang ditempuh adalah dengan kebijakan sistem ekonomi terbuka, reformasi ekonomi, dan menerima bantuan luar negeri berupa pinjaman dari IMF dan Amerika Serikat.

Hosni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Mesir pada 11 Februari 2011. Dia mundur melalui demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Mesir. Rezim Hosni Mubarak runtuh disebabkan tiga faktor, yaitu faktor politik, faktor agama, dan faktor ekonomi. dalam faktor politik disebabkan pengekangan kebebasan terhadap pihak oposisi dan juga pengekangan terhadap rakyat untuk berekspresi. Dalam bidang agama diakibatkan pengekangan kebebasan untuk kelompok-kelompok Islam sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan bebas. Dalam bidang ekonomi disebabkan pengangguran, kemiskinan, dan korupsi.

#### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan agar melakukan penelitian ini lebih mendalam di berbagai kebijakan meliputi faktor politik, agama, dan ekonomi. Bahkan kebijakan untuk mempertahankan kebijakan tersebut dapat dilihat lagi dari berbagai faktor lainnya. Penelitian seperti ini

sebaiknya dilakukan di Mesir agar mudah mendapat data yang benar-benar valid, terutama dari pemerintahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiman, Arif. *Teori Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Cahyo, Agus N. *Tokoh Timur Tengah yang Diam-Diam Jadi Antek Amerika dan Sekutunya*. Jogjakarta: DIVA Press, 2011.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. *Ekspresi Politik Mesir*. Trans. Rofik Suhud. Bandung: Penerbit Mizan, 1998. Trans. of *Muslim Politics*, 1996.
- Freedman, Robert. *The Middle East Since Camp David*. America: Westview Press, 1984.
- Gerges, Fawaz A. *Amerika dan Islam Politik*. Trans. Kili Pringgodigdo and Hamid Basyaib. Jakarta: AlvaBet, 2002. Trans. of *America and Political Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?*, 2002.
- Haynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*. Trans. P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000. Trans. of *Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement*, 1997.
- Iqbal, Akhmad. *Perang-Perang Paling Berpengaruh Di Dunia*. Jogjakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
- Ricardo, David Akhmad. *Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*. Jakarta: Arus Timur, 2011.
- Salim, Zulharbi. *Anwar Sadat & Jerusalem*. Jogjakarta: Gre Publishing, 2011.
- Sihbudi, Riza dkk, *Profil Negara-Negara Tmur Tengah*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Sukanta. *Konflik Tidak Berujung*. Jakarta: Teraju, 2007.
- Syafiie, Inu Kencana dkk., *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama Jaya, 2007.
- Syamsumar, Dam & Agus R. Rahman. *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001.
- Tamburaka, Apriadi. *Revolusi Timur Tengah*. Jakarta: PT. Buku Seru, 2011.
- Utorodewo, Felicia N., dkk. *Bahasa Indonesia*. (Ed. ke-4). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011.
- ‘Usmani, Ahmad Rofi. *Dari Istana Topkapi Hingga Eksotisme Masjid Al-Azhar*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Swasono, Sri-Edi. *Pedoman Menulis Daftar Pustaka, Catatan Kaki Untuk Karya dan Terbitan Ilmiah*. Jakarta: UI-Press. 2001.

### Surat Kabar

- Azra, Azyumadi. "Krisis Mesir dan Indonesia" *Republika*, 10 Feb. 2011.
- Bawazier, Fuad. "Revolusi Mesir: Pergantian Sistem." *Republika* 14 Feb. 2011.
- "Dilema Husni Mubarak." *Republika* 5 Feb. 2011.
- "Kantor Pemerintah Dibakar." *Kompas* 28 Jan. 2011: 8.
- "Kairo Porak Poranda." *Kompas* 30 Jan. 2011: 11.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Revolusi Tahrir dan Demokrasi." *Republika* 22 Feb. 2011.
- "Mesir Tidak Menentu." *Kompas* 31 Jan. 2011: 10.
- "Mubarak Didesak Turun." *Kompas* 27 Jan. 2011: 8.
- "Mubarak Terancam." *Kompas* 29 Jan. 2011: 8.
- Murtiaji, Nur Hasan. "Mantan Pejabat Mesir Dicekal." *Republika*, 14 Feb. 2011.
- Rahman, Musthafa Abd. "Militer Tentukan Masa Depan Mesir." *Kompas* 30 Jan. 2011.
- Respati, Yogie. "Krisis Keuangan Ancam Mesir." *Republika* 6 Feb. 2011.
- "Revolusi Mesir di Depan Mata." *Kompas* 30 Jan. 2011: 10.
- Rostiyani, Yeyen. "Kekayaan Rahasia Sang Firaun Modern" *Republika* 4 Feb. 2011.
- Sammy, Abdullah. "Elbaradei Pun Pulang." *Republika* 1 Feb. 2011.
- \_\_\_\_\_. "Negosiasi Mesir Gagal." *Republika* 8 Feb. 2011.
- \_\_\_\_\_. "'Dwifungsi' Militer Ala Mesir." *Republika* 8 Feb. 2011.
- \_\_\_\_\_ dan Esthi Maharani. "Husni Mubarak Mundur." *Republika*, 12 Feb. 2011.
- \_\_\_\_\_ dan Hiru Muhammad. "Militer Mesir Turun Tangan." *Republika* 12 Feb. 2011.

### Majalah

- Indrietta, Nieke. "Spekulasi Emas Hitam Suez." *Tempo* 13 Feb. 2011: 92.
- Hahhata, El-Sayyid el Badawy. "Darah yang Tumpah Tak Sia-Sia" *Tempo* 13 Feb. 2011: 106.
- "Inspirasi dari Tunisia." *Tempo* 6 Feb. 2011: 103.
- Sari, Suryani Ika. "Khawatir Sendiri Lagi" *Tempo* 13 Feb. 2011: 103.
- "Senjakala Mubarak." *Tempo* 13 Feb. 2011: 21.
- Tajudin, Qaris and Akbar Pribadi Brahmana Aji. "Revolusi Tweeps" *Tempo* 13 Feb. 2011: 99-102.
- \_\_\_\_\_ and Ninin Damayanti. "Mereka yang Berkata Ya!" *Tempo* 13 Feb. 2011: 104-105.

\_\_\_\_\_. Padjar Iswara, dan Akbar Pribadi. “Revolusi Mesir” *Tempo* 20 Feb. 2011: 96-98.

### Skripsi

Kurniasih, Retno. “Piramida, Peninggalan Budaya dari Peradaban Mesir Kuno”. Skripsi Sarjana. Depok: Universitas Indonesia, 2010.

### Tesis

Abdurrohman Kasdi. “Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Arief, R.A. “Politik Luar Negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

Ibrahim Faisal. “Perkembangan Civil Society di Negara-Negara Arab”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.

Machrus, Mochammad. “Kebijakan Pemerintah Mesir Terhadap Agama Minoritas Studi Kasus Atas Diskriminasi Kristen Koptik Pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak (1981-2007)”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

### MajalahOnline

“IMF, Siapakah Dia? *Tempo* 18 Oktober 1997. 24 Mei 2012 <<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/33/utama9.htm>>.

### Ensiklopedia

Esposito, John L. (ed). *Ensiklopedi Oxford “Dunia Modern Islam”* Jilid 1, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y. N. et. Al. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Oxford “Dunia Modern Islam”* Jilid 2, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y. N. dkk. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Oxford “Dunia Modern Islam”* Jilid 3, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y. N, dkk, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Oxford “Dunia Modern Islam”* Jilid 4, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y. N. dkk, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Redaksi Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*, Jakarta: PT. Intermedia. 1990.

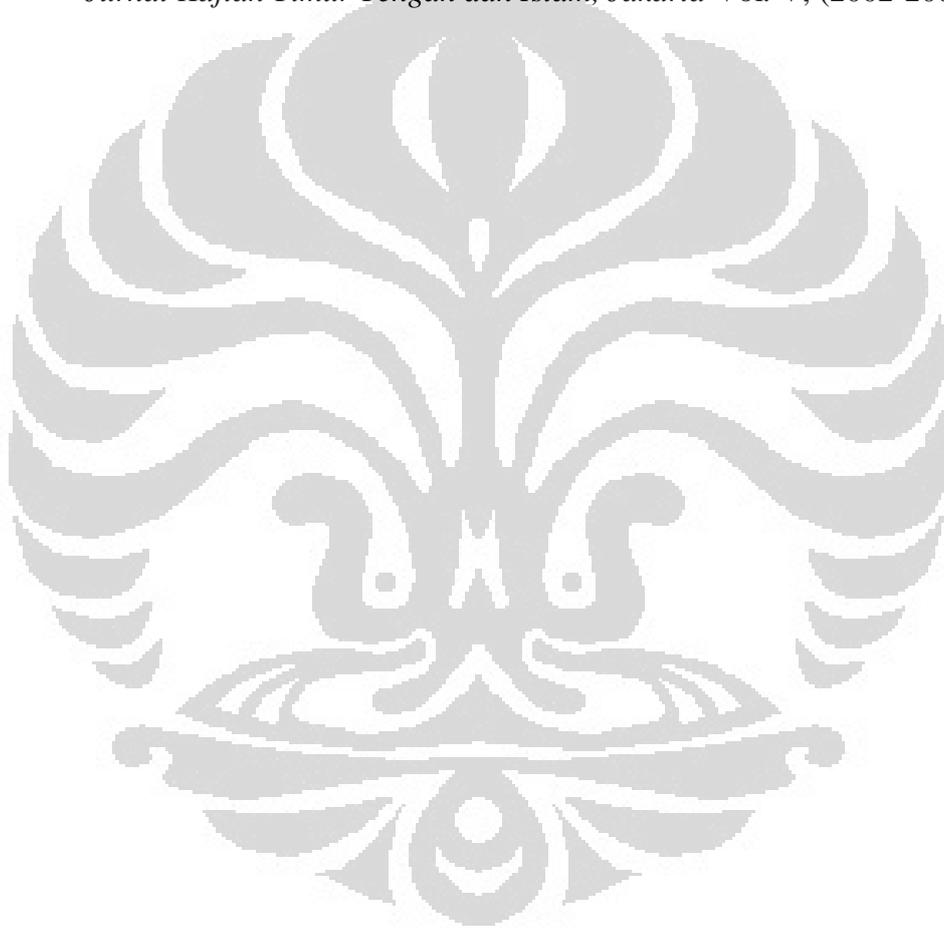
**Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

**Jurnal Ilmiah**

Masyrofah, “Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina”. *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam*, Vol. 14 (2008): 53.

Syadat H., M. Umar. “Pan-Arabisme VIS-À-VIS Zionisme-Imperialisme Modern”. *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam*, Jakarta Vol. V, (2002-2003): 1.



## Lampiran 1

Bendera Mesir



Peta Mesir



Hosni Mubarak



Hosni Mubarak dan Keluarga

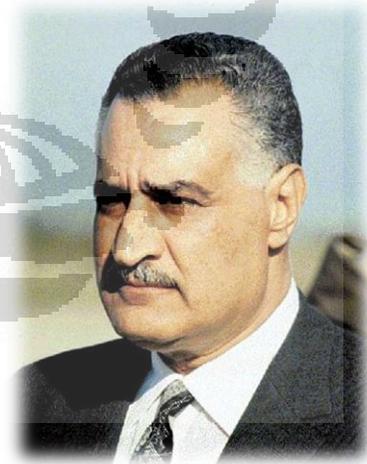


Hosni Mubarak Saat Menjadi Wakil Presiden Mesir Mendampingi Anwar Sadat



Anwar Sadat

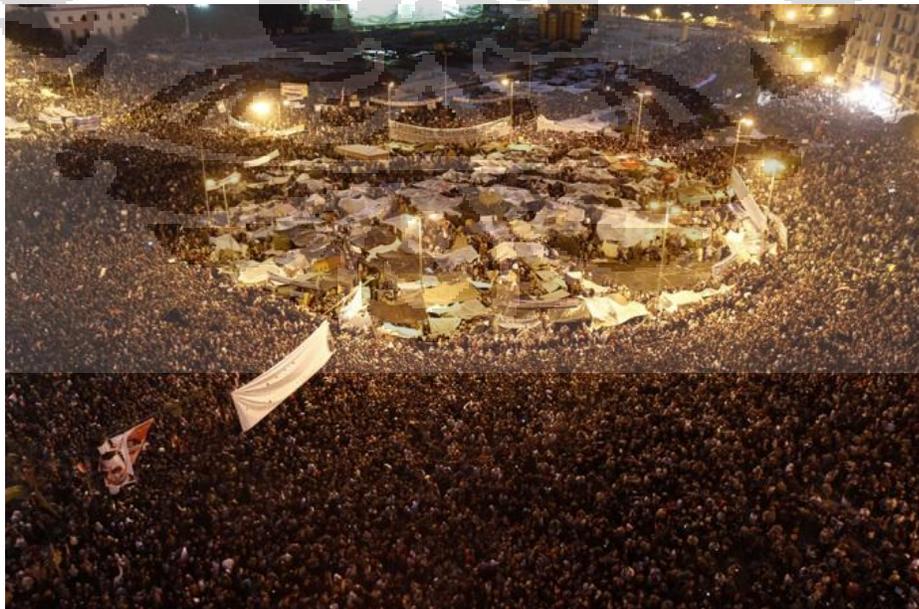
Gamal Abdul Nasser



Demonstrasi di Tahrir Square



Demonstrasi di Tahrir Square Tetap Dilakukan Saat Malam Hari



Anak Kecil Ikut Serta Dalam Demonstrasi di Kairo



Dua Pemuda Berani Menaiki Papan Petunjuk Jalan Dalam Demonstrasi di Mesir



Wakil Presiden Mesir 2011, Omar Sulaeman, Mengumumkan Pengunduran Diri Hosni Mubarak Lewat Sebuah Stasiun Televisi



Demonstran Bergembira Atas Pengunduran Diri Hosni Mubarak



Kembang Api Menjadi Menghiasi Kegembiraan Demonstran Atas Pengunduran Diri Hosni Mubarak

